KALENDER KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran/Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
IRBAN I				
1	Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Program & Kegiatan dalam RPD/RKPD 2024 Berisiko Tinggi	Oktober	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
2	Audit Ketaatan Perangkat Daerah	November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
3	Reviu RKPD/RPJPD/Renstra/Renja PD/RKA RKPD	Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
4	Reviu LPPD	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
5	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
6	Reviu SAKIP Pemda	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
7	Evaluasi SAKIP	Mei	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
8	Pemeriksaan Bantuan Keuangan	Februari-Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
9	Pengawasan Dana Desa	Mei-Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
10	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
11	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Maret-Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
12	Pengawasan On Call	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
13	Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
14	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Kemiskinan Ekstrim	Mei	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
15	Pengawasan akhir masa jabatan Bupati/Wali Kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
16	Pembinaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Januari-Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
17	Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Januari, April, Agustus, September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
18	Reviu Penerapan Pengelolaan Risiko	Januari-Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
19	Desk Akuntabilitas	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)

IRBAN II				
1	Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Program & Kegiatan dalam RPD/RKPD 2024 Berisiko Tinggi	November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
2	Audit Ketaatan Perangkat Daerah	Agustus-September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
3	Reviu RKPD/RPJPD/Renstra/Renja PD/RKA RKPD	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
4	Pemeriksaan Bantuan Keuangan	Februari- Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
5	Pengawasan Dana Desa	Juli-Agustus	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
6	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
7	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Maret-Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
8	Pengawasan On Call	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
9	Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (Good Corporate Governance)	Januari-Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
10	Pengawasan akhir masa jabatan Bupati/Wali Kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
11	Pengawasan P3DN	Juli-Agustus, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
12	PMPRB dan PMPZI	Februari-Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
13	Desk Akuntabilitas	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
IRBAN III				
1	Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Program & Kegiatan dalam RPD/RKPD 2024 Berisiko Tinggi	Januari-Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
2	Audit Ketaatan Perangkat Daerah	November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
3	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender	Februari-Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
4	Pemeriksaan Bantuan Keuangan	April-Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
5	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)	Juli-Oktober	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
6	Pengawasan Dana Desa	Mei-Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
7	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	Januari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)

8	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU)	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
9	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	April-Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
10	Evaluasi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
11	Pengawasan On Call	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
12	Reviu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Juni	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
13	Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP	Januari, April	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
14	Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
15	Desk Akuntabilitas	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
IRBAN IV				
1	Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Program & Kegiatan dalam RPD/RKPD 2024 Berisiko Tinggi dan Audit Ketaatan	September-Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
2	Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD/Reviu KUA/PPAS Murni & Perubahan	Mei-September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
3	Pemeriksaan Bantuan Keuangan	April-September	Perangkat Daerah	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/
4	Pengawasan Dana Desa	Juli-September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
5	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
6	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU)	Juli-Oktober	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
7	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Februari-Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
8	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	April-Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
9	Pengawasan On Call	Januari-Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
10	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) TEPRA	Maret-April	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
11	Monev Proyek Strategis	Maret-April	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
12	Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan Persediaan, Aset Tetap dan Penyusutannya	Januari-Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
13	Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Juni-Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
14	Pengawasan akhir masa jabatan Bupati/Wali Kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	April-Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
15	Desk Akuntabilitas	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)

IRBAN INVESTIGASI				
1	Pengawasan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Februari, Agustus, Oktober, November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
2	Klarifikasi Pengaduan Berkadar Pengawasan	Januari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
3	Pengawasan Khusus Pengaduan Berkadar Pengawasan	Juni, Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
4	Probity Audit	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
5	Reviu Manajemen ASN	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
6	Reviu ASB	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
7	Reviu Tata Kelola BMD	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
8	Reviu HPS	Januari, Februari, Maret, Juni , Juli	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
9	Reviu SSH dan HSPK	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
10	Reviu Tata Kelola Perizinan	November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
11	Monitoring dan Evaluasi TLHP Kasus	Februari, Agustus, Oktober, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
12	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Agustus	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
13	Reviu Pelayanan Publik	Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
14	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Maret	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
15	Reviu Tata Kelola PBJ	September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
16	Reviu SDM dan Anggaran Irbansus Kab/Kota	April, Mei	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
17	Sosialisasi Anti korupsi	Agustus	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
18	Supervisi ke Kab/Kota untuk PWKKND/PUTT	Januari, Juli, Oktober	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
19	Sosialisasi Dumas dan WBS	Juni, November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
20	Pengawasan On Call	Januari, Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
21	Operasionalisasi Saber Pungli	1 Tahun	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
22	Monitoring Stranas PK	Februari, Juni, Agustus, November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
23	Monitoring Survey Penilaian Integritas	Februari, Juni, Agustus, November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
24	Monitoring Center for Prevention (Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah)	Maret, Juni, September, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)
25	Desk Akuntabilitas	Tentatif	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif (Jumlah Entitas Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota)

SEKRETARIAT				
1	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI & APIP	1 Tahun	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	27 Kabupaten/Kota dan 46 Perangkat Daerah
2	Rakorwasdanas Pemutakhiran TLHP Itjen	Oktober/November	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	27 Kabupaten/Kota dan 46 Perangkat Daerah
3	Rapat Koordinasi Pemutakhiran TLHP APIP	Juli, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	27 Kabupaten/Kota dan 46 Perangkat Daerah
4	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT) Tahun 2025	Mei, Juni, Desember	Internal	40
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT)	April, Juli, Oktober, Desember	Internal	40
6	Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Evaluasi Kinerja Penjabat Gubernur Jawa Barat	Mei, Juni	Tim Penyusun Laporan Pj. Gubernur	30
7	RAKORWASDA	Oktober	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	27 Kabupaten/Kota
8	Rapat Koordinasi PKS APIP & APH	Mei, Agustus, September	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Tentatif
9	Forum Perangkat Daerah/Inspektorat Se-Jawa Barat	Februari	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	27 Kabupaten/Kota
10	Acara Puncak HAKORDIA	November, Desember	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, Umum	UMUM (500 - 1000 Peserta)
11	Pelatihan di Kantor Sendiri	Tentatif	Internal	30
12	Pendidikan profesional berkelanjutan	Tentatif	Internal	50

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN I

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP					JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WK PJ	PT	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																			
1-IRB 1	Reviu Manajemen Risiko (MR) Tahun 2025 dan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, akurasi, keandalan, dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan risiko oleh UPR Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh UPR Tingkat Perangkat Daerah	Kebijakan pengelolaan risiko, struktur pengelola risiko, penilaian risiko atau register Risiko Strategis Pemerintah Daerah Provinsi (RSP), Risiko Strategis OPD (RSO), dan Risiko Operasional OPD (ROO), pengomunikasian risiko, pemantauan risiko, realisasi rencana tindak pengendalian atas RSP, RSO, dan ROO sampai dengan triwulan III, pelaporan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Risiko sampai dengan triwulan III, hambatan pelaksanaan Pengelolaan Risiko; dan dukungan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Risiko	I	Minggu II Januari	Minggu IV Januari	10	10	30	30	100	170	3	Rp 232.070.000,00	38 LHP	Laptop, printer alat tulis	Rendah	
II. FEBRUARI																			
2-IRB 1	Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan	Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 oleh Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	I	Minggu I Februari	Minggu IV Februari	20	20	60	60	180	320	3	Rp 398.312.500,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner, alat uji sipil	Mandatory	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok
III. MARET																			
3-IRB 1	Pengawasan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati/Wali Kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahapan kegiatan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah	Capaian RPJMD/RPD, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum dengan indikator keberhasilan sesuai dengan target capaian pada RPJMD/RPD	I	Minggu II April	Minggu I Mei	15	15	45	45	135	240	3	Rp 308.932.500,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok
4-IRB 1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja intansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	I	Minggu IV Maret	Minggu IV Maret	4	4	4	4	12	24	1	Rp 33.117.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	

5-IRB 1	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan LPPD yang berkualitas dan Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	I	Minggu IV Maret	Minggu IV Maret	4	4	4	4	12	24	1	Rp 27.157.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
6-IRB 1	Evaluasi Manajemen Risko Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, akurasi, keandalan, dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan risiko oleh UPR Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh UPR Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi	Kebijakan pengelolaan risiko, struktur pengelola risiko, penilaian risiko atau register Risiko Strategis Pemerintah Daerah Provinsi (RSP), Risiko Strategis OPD (RSO), dan Risiko Operasional OPD (ROO), pengomunikasian risiko, pemantauan risiko, realisasi rencana tindak pengendalian atas RSP, RSO, dan ROO sampai dengan triwulan III, pelaporan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Risiko sampai dengan triwulan III, hambatan pelaksanaan Pengelolaan Risiko; dan dukungan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Risiko	I	Minggu IV Maret	Minggu IV Maret	4	4	4	4	12	24	1	Rp 28.452.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
IV. APRIL																			
7-IRB1	Pengawasan Umum Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pengawasan Teknis terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagai GWPP termasuk SPM Berbasis e-SPM	Pengawasan	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengawasan Umum: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia (IMM), Tingkat Kemiskinan, Penurunan Intensitas Emisi GRK, Penguatan Tata Kelola Pemerintah Pengawasan Teknis: Urusan Pendidikan (Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPM Pendidikan), Urusan Kesehatan (Terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Penurunan Stunting (Lintas K/L), Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar, Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi, Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC *Succes Rate*), Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin, Urusan Pekerjaan Umum (Mewujudkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, terselenggara jasa konstruksi di Daerah, meningkatnya konektivitas wilayah, terselenggaranya bangunan Gedung yang Tertib dan Andal), Urusan Penataan Ruang (terselesaikannya rencana tata ruang daerah, terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan), Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan (Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi, Meningkatnya pelayanan tratibum yang terintegrasi), Urusan Sosial (Terpenuhinya kebutuhan Dasar SPM Bidang Sosial, Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial, berkurang beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar,	I	Minggu I Maret	Minggu III Maret	15	15	45	45	135	240	3	Rp 301.162.500,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner, alat uji sipil	Mandatory	

8-IRB 1	Pengawasan (Monev) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk menilai progress tindak lanjut dari Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 oleh Perangkat Daerah	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024 oleh Perangkat Daerah	I	Minggu II April	Minggu III April	6	6	6	6	24	42	1	Rp 55.352.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner		
9-IRB 1	Reviu RKPD Tahun 2026	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan RKPD Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Permendagri yang mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026)	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran b. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD c. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran d. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima e. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok	I	Minggu II April	Minggu III April	5	5	5	5	15	30	1	Rp 40.587.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
V. MEI																			
10-IRB 1	Reviu RPJMD Tahun 2025-2029	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah	Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	I	Minggu II Mei	Minggu III Mei	5	5	5	5	15	30	1	Rp 40.587.500,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
11-IRB 1	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2025	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah	Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	I	Minggu II Mei	Minggu III Mei	5	5	5	5	15	30	1	Rp 40.587.560,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	

	Reviu Renja Perangkat Daerah Murni Tahun 2026	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah	Renja Perangkat Daerah Murni Tahun 2026	I	Minggu II Mei	Minggu II Mei	5	5	15	15	45	80	3	Rp 95.372.500,00	11 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Sesuai Jumlah Mitra Perangkat Daerah Irban I
	Reviu Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025	I	Minggu III Mei	Minggu III Mei	5	5	15	15	45	80	3	Rp 95.372.500,00	11 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Sesuai Jumlah Mitra Perangkat Daerah Irban I
12-IRB 1	Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan	Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 oleh Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	II	Minggu II Mei	Minggu I Juni	20	20	60	60	180	320	3	Rp 406.082.500,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor
VI. JUNI																			
				Pengawasan Umum: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia (IMM), Tingkat Kemiskinan, Penurunan Intensitas Emisi GRK, Penguatan Tata Kelola Pemerintah Pengawasan Teknis: Urusan Pendidikan (Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPM Pendidikan), Urusan Kesehatan (Terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI),														

13-IRB1	Pengawasan Umum Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pengawasan Teknis terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagai GWPP termasuk SPM Berbasis e-SPM	Pengawasan	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penurunan Stunting (Lintas K/L), Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar, Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi, Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Succes Rate), Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin, Urusan Pekerjaan Umum (Mewujudkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, terselenggara jasa konstruksi di Daerah, meningkatnya konektivitas wilayah, terselenggaranya bangunan Gedung yang Tertib dan Andal), Urusan Penataan Ruang (terselesaikannya rencana tata ruang daerah, terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan), Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan (Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi, Meningkatnya pelayanan tratibum yang terintegrasi), Urusan Sosial (Terpenuhinya kebutuhan Dasar SPM Bidang Sosial	II	Minggu II Mei	Minggu I Juni	13	13	39	39	117	208	3	Rp 270.072.916,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor
14-IRB1	Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi TA 2024-2025	Pendampingan	Aktivitas ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan kepada pimpinan instansi dalam pemenuhan tanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu III Juni	Minggu IV Juni	7	7	21	21	63	112	3	Rp 145.722.724,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
VII. JULI																			
15-IRB1	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP terintegrasi pada Perangkat Daerah	Penjaminan Kualitas	Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan evaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Juli	Minggu II Juli	5	5	15	15	135	170	3	Rp 106.862.660,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
16-IRB1	Pemantauan RTP Semester I Tahun 2025 pada Perangkat Daerah	Monitoring	Aktivitas ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Semester I Tahun 2025 oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu II Juli	Minggu II Juli	5	5	15	15	135	170	3	Rp 118.948.750,00	36 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	

17-IRB 1	Evaluasi LPPD Tahun 2024 pada Kabupaten/Kota	Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk membandingkan hasil LPPD Tahun 2024 pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan serta menentukan faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam mencapai tujuan penyusunan LPPD	LPPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024	I	Minggu I Juli	Minggu III Juli	15	15	45	45	135	240	3	Rp 305.047.500,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
18-IRB 1	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Perangkat Daerah	Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk membandingkan hasil SAKIP Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Jawa Barat dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan serta menentukan faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam mencapai tujuan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	I	Minggu IV Juli	Minggu V Juli	10	10	30	30	90	160	3	Rp 202.070.000,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
19-IRB 1	Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	I	Minggu IV Juli	Minggu IV Juli	5	5	15	15	45	80	3	Rp 106.862.500,00	11 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
20-IRB 1	Reviu RKA Perubahan Tahun 2025	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa RKA Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025)	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	I	Minggu IV Juli	Minggu IV Juli	5	5	15	15	45	80	3	Rp 106.862.500,00	14 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
VIII. AGUSTUS																			

21-IRB 1	Pengawasan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas efektivitas dan kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa	Pendataan, penyaluran, penggunaan dana, pertanggungjawaban keuangan, monitoring Dana Desa	I	Minggu I Agustus	Minggu III Agustus	15	15	45	45	135	240	3	Rp 308.932.740,00	4 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor
IX. SEPTEMBER																			
22-IRB 1	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024	II	Minggu IV Agustus	Minggu II September	15	15	45	45	135	240	3	Rp 308.932.740,00	3 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
23-IRB 1	Diklat	Pendidikan dan Pelatihan	Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per orang per tahun	Pelaksanaan pendidkan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: pengawasan pelayanan publik, pengawasna BUMD, pengawasan keuangan daerah/APBD, pengawasan pengadaan barang/jasa, pengawasan manajemen rumah sakit, audit kinerja, perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, Certified Government Chief Audit Executive, dan pendidikan sertifikasi di bidang penawasan lainnya	II	Minggu III September	Minggu III September	5	-	-	-	80	80	1	Rp 105.200.000,00	1 Laporan Diklat	Transportasi, Laptop, Alat Pendidikan dan Pelatihan	Mandatory	
24-IRB 1	Audit SPBE	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu IV September	Minggu IV September	5	5	5	5	15	30	1	Rp 49.005.030,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
25-IRB 1	Reviu RKA Murni Tahun 2026	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa RKA Murni Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025)	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	I	Minggu V September	Minggu I Oktober	10	10	30	30	90	160	3	Rp 205.955.160,00	14 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
X. OKTOBER																			

	Pengawasan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area pengawasan berupa Program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	I	Minggu II Oktober	Minggu V Oktober	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
26-IRB 1	Pengawasan Ketaatan pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta mampu memberikan saran perbaikan bagi ketaatan Auditi	Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi Auditi dan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan pengendalian.	I	Minggu II Oktober	Minggu V Oktober	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	Terakhir dilakukan Pengawasan pada Tahun 2021
	Pengawasan Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area pengawasan berupa Program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	I	Minggu II Oktober	Minggu V Oktober	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Mandatory	
XI. NOVEMBER																			
	Pengawasan Ketaatan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta mampu memberikan saran perbaikan bagi ketaatan Auditi	Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi Auditi dan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan pengendalian.	II	Minggu I November	Minggu IV November	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Sedang	
27-IRB 1	Pengawasan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area pengawasan berupa Program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	II	Minggu I November	Minggu IV November	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Sedang	

	Pengawasan Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan, memulihkan dampak, serta pemberian saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi	Area pengawasan berupa Program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	II	Minggu I November	Minggu IV November	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Sedang	
XI. DESEMBER																			
28-IRB 1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD Kabupaten Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/kota	Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk membantu Gubernur sebagai GWPP dalam dimensi pengawasan dalam membandingkan hasil/ prestasi dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam mencapai tujuan penyusunan APBD maupun penjabarannya	Penyusunan RAPBD beserta Penjabarannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	I	Minggu I Desember	Minggu I Desember	3	3	3	3	6	15	1	-	1 LHP (Gabungan masing-masing Irban)		Mandatory	
29-IRB 1	Monev Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	Monitoring dan Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pengelolaan Keuangan oleh Pejabat yang berwenang di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan tahun berjalan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Desember	Minggu I Desember	3	3	3	3	6	15	1	-	1 LHP (Gabungan masing-masing Irban)		Sedang	
	Pengawasan Ketaatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta mampu memberikan saran perbaikan bagi ketaatan Auditi	Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi Auditi dan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan pengendalian.	III	Minggu I Desember	Minggu IV Desember	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Tinggi	
30-IRB 1	Pengawasan Ketaatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta mampu memberikan saran perbaikan bagi ketaatan Auditi	Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi Auditi dan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan pengendalian.	III	Minggu I Desember	Minggu IV Desember	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Tinggi	

	Pengawasan Ketaatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta mampu memberikan saran perbaikan bagi ketaatan Auditi	Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi Auditi dan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan pengendalian.	III	Minggu I Desember	Minggu IV Desember	20	20	20	20	60	120	1	Rp 135.360.940,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Tinggi	

PETUNJUK PENGISIAN

(1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
(2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
(3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
(4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
(5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
(6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
(7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
(8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
(9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
(10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
(11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
(12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN II

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP					JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WK PJ	PT	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																			
1-IRB 2	Asistensi dan Pendampingan Unit Kerja Zona Integritas	Asistensi dan Pendampingan	Aktivitas ini bertujuan untuk membantu Unit Kerja dalam rangka pembangunan zona integritas pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Januari	Minggu III Januari	12	12	24	24	72	132	2	Rp 164.100.000,00	2 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner, alat uji sipil	Mandatory	15 Unit Kerja

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN III

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP					JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WP PJ	PT	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																			
1-IRB3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Pengelolaan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Januari	Minggu I Januari	6	6	6	6	24	42	1	Rp 67.890.000,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Permintaan	
2-IRB3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Reviu Pengelolaan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Januari	Minggu I Januari	6	6	6	6	24	42	1	Rp 61.960.000,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner,	Permintaan	
3-IRB3	Reviu DAU	Reviu	Aktivitas ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAU.	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAU beserta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan	I	Minggu II Januari	Minggu I Februari	20	20	44	44	172	280	6	Rp 175.360.000,00	6 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Permintaan	15 Unit Kerja

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN IV

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP					JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WP PJ	PT	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																			
1-IRB 4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pengawasan Fisik Lapangan Tahun 2024 mengenai Klarifikasi Paket Pengadaan Marka Jalan pada Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi UPTD PPPLLAJ Wilayah IV	Audit	Aktivitas ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi mengenai Klarifikasi Paket Pengadaan Marka Jalan pada Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi UPTD PPPLLAJ Wilayah IV	Paket Pengadaan Marka Jalan pada Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi UPTD PPPLLAJ Wilayah IV Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	I	Minggu I Januari	Minggu III Januari	12	12	12	12	48	84	1	Rp 102.420.000,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner, Alat Uji Sipil	Permintaan	
2-IRB 4	Monitoring terhadap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur	Monitoring	Aktivitas ini bertujuan untuk monitoring terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur	Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur	I	Minggu II Januari	Minggu III Januari	5	5	5	5	5	5	1	Rp 44.425.000,00	1 LHP	Mobil, Laptop, Printer, Scanner	Permintaan	

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
IRBAN INVESTIGASI

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP					JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WP PJ	PT	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																			
1-IRB INV	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Aktivitas ini bertujuan untuk membandingkan hasil/prestasi dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam mencapai tujuan dalam Penyelesaiain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Temuan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan BPK yang memuat kerugian daerah yang harus diselesaikan oleh Pihak yang Merugikan maupun ahli waris	I	Minggu I Januari	Minggu IV Januari	20	20	80	80	160	340	4	Rp 578.370.000,00	4 LHP	Mobil, Laptop, Printer	Mandatori	

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT

NO	AREA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PUTARAN	JADWAL			HP				JML TIM	ESTIMASI ANGGARAN	OUTPUT	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
						RMP	RPL	JML (HARI)	WP PJ	KT	AT	JUMLAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. JANUARI																		
1-SEKR	Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	Aktivitas ini bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP	Penyusunan Peta Auditan, Penilaian Tingkat Kematangan manajemen resiko, Penentuan resiko Utama, Penyusunan Perencanaan Pengawasan Intern, Penyampaian Informasi kepda Pimpinan	I	Minggu III Januari	Minggu IV Januari	5	5	5	75	85	1	Rp 269.029.000,00	1 PKPT yang disahkan dengan Keputusan Gubernur	Mobil, Laptop, Printer	Mandatori	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Ternate no 2, Telepon: (022) 4235026, Faksimili: (022) 4203960,
Website : bkd.jabarprov.go.id, e-mail : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

AGENDA PROGRAM / KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JABAR TAHUN 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran (APBD)	Besar Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	467,648,250
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	14 Dokumen	Jan - Des	DPA Murni 2025	319,310,000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	4 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	148,338,250
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	48,352,216,143
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd.	140 Orang/ Bulan	Jan - Des	DPA Murni 2025	48,114,032,674
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd.	15 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	238,183,469
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	61,100,000
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd.	25 Orang		DPA Murni 2025	61,100,000
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	2,071,669,550
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd. - Novianti, S.Pd., M.Pd.	20 Paket	Jan - Des	DPA Murni 2025	403,222,050
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd. - Novianti, S.Pd., M.Pd.	12 Paket	Jan - Des	DPA Murni 2025	258,365,500
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd. - Novianti, S.Pd., M.Pd.	12 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	350,000,000
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd. - Novianti, S.Pd., M.Pd.	12 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	1,060,082,000
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	846,408,530
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	1 Unit	Jan - Des	DPA Murni 2025	846,408,530
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	5,219,815,856
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	12 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	506,396,816
18.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	12 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	103,560,000
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	12 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	4,609,859,040
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Roby Budiman, S.H., M.H.		Jan - Des	DPA Murni 2025	1,849,793,059
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	37 Unit	Jan - Des	DPA Murni 2025	768,490,000
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.	12 Unit	Jan - Des	DPA Murni 2025	1,081,303,059
23.	Pengisian JPT dan JA, Ujikom Calon KRS dan/atau Pelaksanaan Seleksi Terbuka	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	2 Dokumen Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	363,900,000
24.	Pemenuhan Evidence Sistem Merit	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	400 poin/1 Dokumen Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	93,600,000
25.	Fasilitasi Rekomendasi Kabupaten/Kota	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	12 Dokumen Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	57,070,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB38CBD71D
AB38CBD71D

26.	Verifikasi dan Validasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	6 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	130,883,300
27.	Verifikasi dan Validasi Kenaikan Pangkat golongan IV keatas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	6 Laporan	Jan - Des	-	-
28.	Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	2 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	162,898,000
29.	Fasilitasi usulan Peninjauan Masa Kerja	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	-	-
30.	Fasilitasi usulan Kenaikan Gaji Berkala eselon II	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	-	-
31.	Fasilitasi Mutasi Antar Kabupaten Kota	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	59,670,000
32.	Pelaksanaan Seleksi Mutasi Masuk ke Lingkungan Provinsi Jawa Barat melalui Akuisisi Talenta dan Atau Talent Scouting	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	2 Laporan	Agustus dan November	DPA Murni 2025	89,850,000
33.	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana melalui Fit And Proper Test	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	2 Laporan	April dan September	DPA Murni 2025	173,150,000
34.	Akselerasi penerbitan Pertek Mutasi bagi Jabatan Pelaksana melalui Konsinyering BKN	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	6.160 pegawai	Juni	DPA Murni 2025	10,800,000
35.	Fasilitasi Penerbitan SK Rotasi Internal Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	62,850,000
36.	Fasilitasi Penerbitan SK Mutasi Pegawai Antar Perangkat Daerah	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	-	-
37.	Fasilitasi Penerbitan SK Pengaktifan Pegawai dalam Jabatan Pelaksana (Paska TUBEL, CLTN dan Terdampak HUKDIS)	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Jan - Des	-	-
38.	Penyusunan Blueprint Rencana Mutasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025	Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.	1 Laporan	Februari	-	-
39.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Oky Putranto, S.STP., M.A.P.	5 Dokumen	Jan - Des	DPA Murni 2025	634,083,800
40.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Oky Putranto, S.STP., M.A.P.	9 Orang	Feb - Nov	DPA Murni 2025	1,022,172,643
41.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Oky Putranto, S.STP., M.A.P.	5.000 Orang	Mei - Des	DPA Murni 2025	121,673,000
42.	Pembinaan Disiplin ASN	Oky Putranto, S.STP., M.A.P.	50.000 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	334,536,729
43.	Pelayanan Proses Izin Perceraian pegawai	Oky Putranto, S.STP., M.A.P.	4 Dokumen	Jan - Des	DPA Murni 2025	32,270,708
44.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM.	100 Persen	Jan - Des	DPA Murni 2025	1,636,062,000
45.	Layanan Pendidikan Lanjutan APBD	Egi Pranata, S.STP.	12 Dokumen/ Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	1,636,062,000
46.	Layanan Pendidikan Lanjutan Non APBD	Egi Pranata, S.STP.	12 Dokumen/ Laporan	Jan - Des	-	-
47.	Layanan Pendidikan Lanjutan Mandiri	Dr. Joe Monang, S.T., MA.	12 Dokumen/ Laporan	Jan - Des	-	-
48.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM.	10 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	117,120,000
49.	ASN ikut serta dalam Pelatihan JPT dan Jabatan Administrasi	Egi Pranata, S.STP.	2 Dokuman/ Laporan	Jan - Des	DPA Murni 2025	117,120,000
50.	Pembentukan Agen Perubahan	Nji Raden Laila Mahmudah, S.E.	2 Kepgub	Jan - Des	-	-
51	Layanan Fasilitasi Diklat Jabatan Fungsional	- Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM. - Ahmad Soebagdja, S.IP.	50 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	123,993,580
52.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM.	100 Orang	Jan - Nov	DPA Murni 2025	177,450,900
53.	Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Nunik Yusnita Kuswara, S.E.	100 Orang		-	-
54.	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM.	75 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	207,103,000
55.	Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Fungky Sandi Maharany, S.IP	75 Orang	Jan - Des	-	-
56.	Penyusunan Instrumen Kompetensi Teknis	Ahmad Soebagdja, S.IP.	30 Dokumen	Jan - Des	-	-
57.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional	- Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM. - Saeful Ramadhan Sobandi, S.STP., M.Si.	100 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	56,380,000
58.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	- Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM. - Saeful Ramadhan Sobandi, S.STP., M.Si.	100 Orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	112,300,000
59.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	- Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., MM. - Saeful Ramadhan Sobandi, S.STP., M.Si.	100 Persen	Jan - Des	DPA Murni 2025	413,582,010
60.	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Saeful Ramadhan Sobandi, S.STP., M.Si.	2 Unit	Feb - Des	DPA Murni 2025	33,624,580

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB38CBD71D
AB38CBD71D

61.	Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS Prapurnabhakti	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	400 orang	Feb - Okt	-	-
62.	Fasilitasi kegiatan KORPRI Provinsi Jawa Barat	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	27 Kabupaten/ Kota	Jan - Des	DPA Murni 2025	235,698,434.53
63.	Fasilitasi kesejahteraan ASN	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	1000 orang	Jan - Des	DPA Murni 2025	5,160,000
64.	Fasilitasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	3 kasus	April - Nov	DPA Murni 2025	75,765,776
65.	Fasilitasi kegiatan PORNAS	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	200 ASN	Agustus	-	-
66.	Fasilitasi kegiatan PORPEMDA	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	200 ASN	November	-	-
67.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi - SIAP JABAr (3 Sistem) dan Sistem Layanan (15 Sistem) serta JSA (1)	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	19 Sistem Informasi	Jan - Juni	DPA Murni 2025	1,487,626,332
68.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi Manajemen Kinerja (8 Sistem) dan Manajemen Talenta (11 Sistem)	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	19 Sistem Informasi	Juli - Desember	DPA Murni 2025	1,487,626,332
69.	Pengelolaan Data Kepegawaian Layanan - Layanan Penerbitan KARIS/KARSU - Layanan Perbaikan Status - Layanan Integrasi Data / Replikasi Sistem	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	3 Layanan Data/Sistem	Jan - Des	DPA Murni 2025	18,114,000
70.	Fasilitasi Pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun	Ahmad Nurhidayat, SE.,M.Kom	39 Perangkat Daerah	Jan - Des	-	-

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ROBY BUDIMAN, S.H., M.H.
Pembina

AB38CBD71D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB38CBD71D

AGENDA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1.	Sekretariat	Forum Perangkat Daerah	Sekretaris	120 orang dari Bakesbangpol 27 Kab/Kota	Februari	APBD Rp. 194.826.000
2.	Sekretariat	Forum Data Sektoral Bidang Kesbangpol	Sekretaris	54 Orang dari Bakesbangpol 27 Kab/Kota	April dan Desember	APBD Rp. 952.308.050
3.	Sekretariat	Forum Mitra Strategis Bakesbangpol	Sekretaris	120 Orang	Juni	APBD Rp. 186.512.000
4.	Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	- 8.378 orang peserta Pendidikan Politik - 2 Dokumen Kajian Politik Dalam Negeri - 3 Dokumen kaji banding - 1 Dokumen bimbingan teknis bantuan keuangan parpol - 1 Dokumen FGD Indeks Demokrasi Indonesia - 2 Dokumen Rakor Indeks Demokrasi Indonesia - 1 Dokumen Forum Poldagri	Januari s.d Desember	APBD Rp. 18.456.910.400.000
5.	Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	- 1 Dokumen Kaji Banding - Dokumen Monitoring dan Koordinasi	Januari s.d Desember	APBD Rp. 500.000.000

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
		Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
6.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa (Program Paskibraka)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	54 Orang	Maret s.d Agustus	APBD Rp. 1.895.850.000
7.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kemah Bhakti Kebangsaan dan Bela Negara)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	120 Orang	Juni	APBD Rp. 1.175.093.900
8.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bazaar Kebangsaan dan Sembako Murah Menjelang Idul Fitri Badan Kesbangpol Jawa Barat)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Maret	APBD Rp. 200.000.000

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
9.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Penyelenggaraan Event Festival Kebangsaan Jawa Barat “West Java Experiences and Nationalism Of Indonesia” Di Amerika Serikat)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Februari	APBD Rp.3.000.000.000
10.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Penyelenggaraan Event Festival Kebangsaan Jawa Barat “West Java Experiences and Nationalism Of Indonesia” Di Provinsi Bali)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Juni	APBD Rp. 900.000.000
11.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Penyelenggaraan Event Festival Kebangsaan Jawa Barat “West Java	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Maret	APBD Rp. 900.000.000

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
		Experiences and Nationalism Of Indonesia" Di Provinsi Jawa Timur)				
12.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Penyelenggaraan Event Festival Kebangsaan Jawa Barat "West Java Experiences and Nationalism Of Indonesia" Di Kepulauan Riau)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	April	APBD Rp. 1.714.183.000
13.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bazaar Kebangsaan dan Sembako Murah Menjelang Idul Fitri Badan Kesbangpol Jawa Barat)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Maret	APBD Rp. 200.000.000
14.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	Januari	APBD Rp. 124.266.000

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
		(Peninjauan Kebijakan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Jawa Barat di Provinsi D.I. Yogyakarta)				
15.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan	Juni dan Desember	APBD Rp. 400.000.000
16.	Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Monitoring dan Evaluasi)	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	12 Kegiatan	Januari s.d Desember	APBD Rp. 345.000.000
17.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun	Kepala Bidang Kesbak	- 1 Dokumen - hibah	Januari s.d Desember	APBD dan Hibah Rp. 5.917.626.950
18.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Program Kerja DiBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan Mediasi Sengketa	Kepala Bidang Kesbak	- 150 orang jambore ormas - 150 orang pemberdayaan ormas	Januari s.d Desember	APBD Rp. 577.835.000

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
		Ormas,Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun		- 100 orang sosialisasi tata cara penganggaran		
19.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan DiBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun	Kepala Bidang Kesbak	- Dokumen - 1 kajian penyusunan pergub ormas	Januari s.d Desember	APBD Rp.276.611.100
20.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kepala Bidang Kesbak	- 2 Kaji banding yogyakarta dan semarang	Januari s.d Desember	APBD Rp. 186.774.000
21.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kepala Bidang Kesbak	1 Dokumen	Januari s.d Desember	APBD Rp. 50.383.750
22.	Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kepala Bidang Kesbak	- 1 Dokumen - 3651 orang	Januari s.d Desember	APBD dan Pokir Rp. 4.766.035.412

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
23.	Kewaspadaan Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kepala Bidang Wasda	- 1 dokumen - 120 orang Rapat Koordinasi	Januari s.d Desember	APBD Rp. 220.000.000
24.	Kewaspadaan Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kepala Bidang Wasda	- dokumen	Januari s.d Maret	APBD Rp. 46.000.000
25.	Kewaspadaan Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kepala Bidang Wasda	- 1 dokumen - 120 orang Rapat Koordinasi	Januari s.d Desember	APBD Rp.173.000.000
26.	Kewaspadaan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Kepala Bidang Wasda	- 1 dokumen - 60 orang Rapat Koordinasi	Januari s.d Desember	APBD Rp. 170.000.000.,

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

No.	Bidang	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
		Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
27.	Kewaspadaan Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kepala Bidang Wasda	1 dokumen 100 orang Rapat Koordinasi	Januari s.d Agustus	APBD Rp. 200.000.000
28.	Kewaspadaan Daerah	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Kepala Bidang Wasda	- 1 dokumen 120 orang Rapat Koordinasi Kabupaten Kota	Januari s.d Desember	APBD Rp. 430.000.000

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. SAPTA YULIANTO DASUKI, M.A.P
Pembina Tk. I

77E2792D95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77E2792D95

AGENDA KEGIATAN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	BIDANG	NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN PELAKSANAAN	SASARAN / PESERTA	PERKIRAAN JUMLAH PESERTA
1	SEKRETARIAT	FORUM PERANGKAT DAERAH	Februari	BPBD dan Dinas Damkar Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota
2		RAKOR KEHUMASAN BPBD KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT	Agustus	BPBD Kabupaten/Kota	54 ORANG
3	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pusdalops	Februari	Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat	56 orang
4		Pendampingan Posko Idul Fitri	Maret - April	BPBD Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota
5		Glasi Kesiapsiagaan terhadap bencana	April - Mei	Aparatur dan Relawan	500 orang
6		Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Tangguh Bencana	April - Juni	Rumah Sakit di Jawa Barat	5 Rumah Sakit di Jawa Barat
7		Jambore Relawan	Juni	Aparatur dan Relawan	1000 orang
8		Ekspedisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Juni - Agustus	Masyarakat Jabar Selatan	900 orang
9		Pendampingan Posko Nataru	Desember	BPBD Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota
10	KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Rapat Peningkatan Kapasitas Anggota Klaster Logistik	April	Anggota Klaster Logistik Jabar	80 Orang
11		Sosialisasi Pembentukan Klaster Logistik Kabupaten/Kota	Juni	Kabupaten/Kota	74 Orang
12		Rakor Hidrometeorologi Basah	September	BPBD Kabupaten/Kota	74 Orang
13		Rakor Hidrometeorologi Kering	Juni	BPBD Kabupaten/Kota	74 Orang
14	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Pendampingan dan Monev Pasca Bencana, Rekomendasi Gubernur	Januari - Desember	BPBD Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota
15		Penyusunan SOP Tim Jitupasna Jawa Barat	Juli - September	OPD Provinsi Jawa Barat	125 orang
16		Pendampingan Penyusunan R3P Provinsi dan Kabupaten/Kota	November - Desember	Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota
17		Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial	Juni - Agustus	Kabupaten/Kota	70 orang
18		Asistensi/Pendampingan Standardisasi Sarana dan Prasarana Damkar di Kab/Kota	Mei - Juli	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota
19		Asistensi/Pendampingan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran Kab/Kota	November - Desember	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota
20		Asistensi/Pendampingan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	Agustus - Oktober	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota
21		Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Sub Urusan Kebakaran	Januari - Maret	BPBD Provinsi Jawa Barat	10 orang
22		Skill Competition Petugas Damkar dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Maret - Mei	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	350 orang
23		Rapat Koordinasi Damkar dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Maret - April	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	70 orang
24		Upacara Peringatan HUT Damkar dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Maret - April	Dinas Damkar Kabupaten/Kota	600 orang

CALENDAR of EVENT 2025

CALENDAR of EVENT 2025

01	Forum Perangkat Daerah untuk Perencanaan 2026	19 Februari 2025	04	“GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTOSHOW" @Bandung	September 2025
02	Rakor Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mei 2025	05	Anugerah Pajak Jawa Barat (Anugerah Philothra)	Minggu ke 1 - IV November 2025
03	Rapat Kerja Asosiasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah se Indonesia	Juli 2025			

01

Forum Kolaborasi Pendapatan Daerah untuk Perencanaan 2026

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dan juga menyuusun kegiatan prioritas tahun 2026 dirangkai dengan Forum Sinergi Pendapatan Provinsi

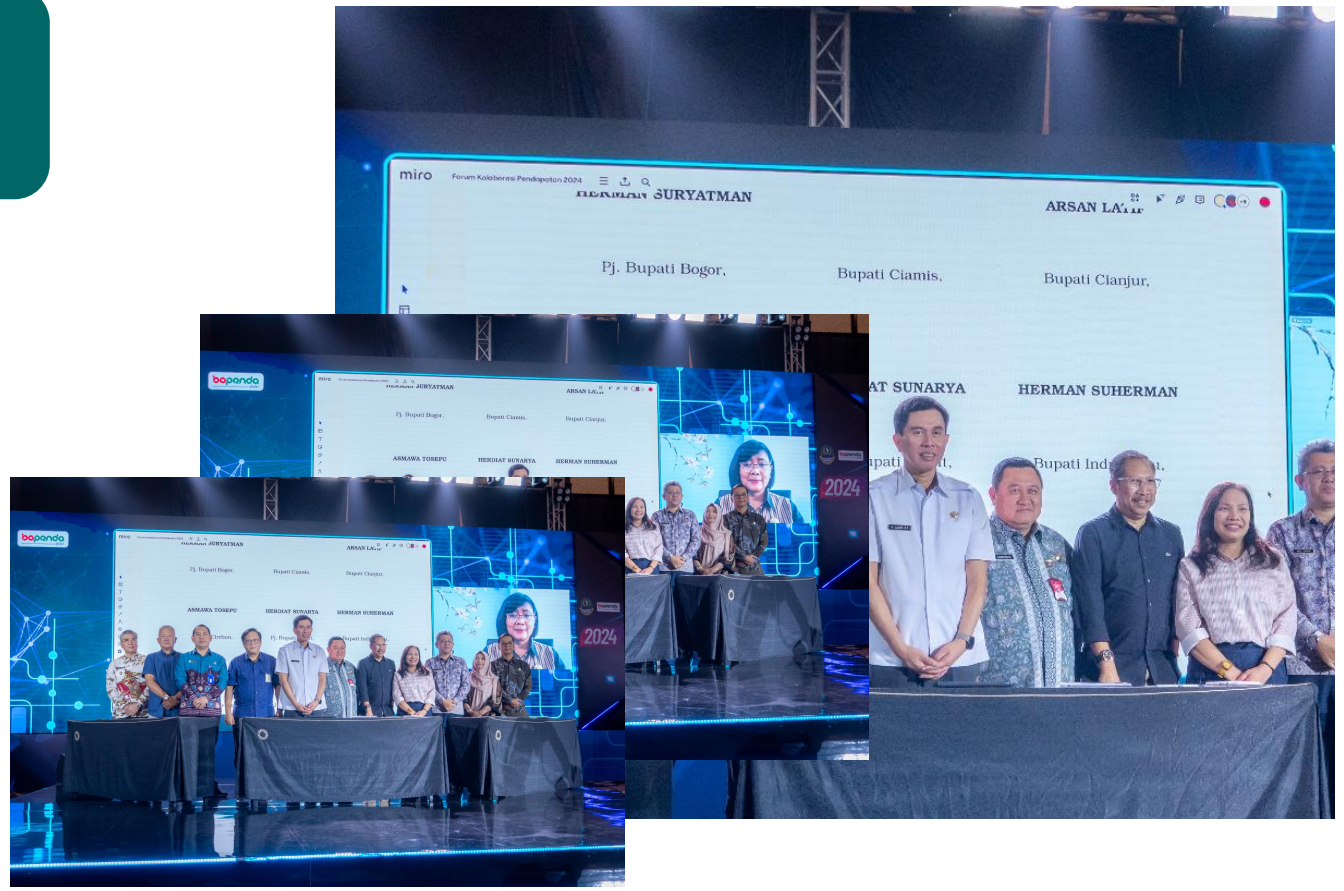

Kota Bandung – Kantor Bapenda
19 Februari 2025

Dihadiri oleh :

- Gubernur Jawa Barat
- DPRD Provinsi Jawa Barat
- Bupati/Walikota
- Tim Pembina Samsat
- Stakeholders

BUDGETING = 100 Juta
APBD : Rp. 100 Juta

Target Audiens :
300 Orang

Output

1. Nota Kesepakatan Sinergi Pengelolaan Pendapatan Provinsi dan Kebupaten/Kota antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Dokumen Rancangan Rencana Kerja 2026

bapenda Jabar
Menembus putaran waktu dengan inovasi

02

Rakor Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Merupakan forum pembahasan penajaman Bapenda Provinsi Jawa Barat dan dan Pemerintah kabupaten/kota terkait persiapan implementasi opsen PKB dan Opsen BBNKB serta merumuskan strategi dan kebijakan perencanaan pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2025

Kota Bandung
Mei 2025

Dihadiri oleh :

- Bapenda Provinsi Jawa Barat
- Bapenda Kabupaten/Kota se Jawa Barat
- P3DW se Jawa Barat

Target Audiens :
150 Orang

BUDGETING = 100 Juta
APBD : Rp. 100 Juta

Output :

1. Draft Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Opsen 2026 antara Provinsi dan Kabupaten?kota
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

04

RAKOR NASIONAL APPDI (ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SE INDONESIA)

ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SE INDONESIA

APPDI

Rapat Koordinasi Pengelola Pendapatan Daerah Seluruh Indonesia

Kota Bandung

Juli 2025

Dihadiri oleh :

- Gubernur Jawa Barat
- Unsur Kemendagri RI
- Unsur Kementerian Keuangan RI
- Bapenda Provinsi se-Indonesia
- Korlantas RI

BUDGETING = 200 Juta

APBD : Rp.100 Juta

Non APBD : Rp.100 Juta

Output :

1. Tersusunnya rekomendasi dan masukan provinsi terhadap kondisi dan isu kekinian terkait pendapatan daerah;
2. Tersusunnya Nota Kesepakatan dan penyepakatan program kerja APPDI.

04

EVENT
GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTO SHOW (GIIAS) BANDUNG 2025

Kota Bandung
September 2025

Pameran otomotif skala nasional di Kota Bandung sebagai upaya mendorong pendapatan daerah dalam BBNKB 1 : pembelian kendaraan baru

Dihadiri oleh :

- Menteri Perindustrian RI
- Gubernur Jawa Barat
- Kapolda
- Sekretaris Daerah Provinsi
- Tim Pembina Samsat
- ATPM

BUDGETING = 100 Juta

APBD : Rp. 100 Juta

Audiens :

1000 orang

Output

- 1000 orang menghadiri acara dan 10% diantaranya membeli kendaraan baru
- Meningkatnya Pendapatan Daerah Bersumber Kendaraan Baru

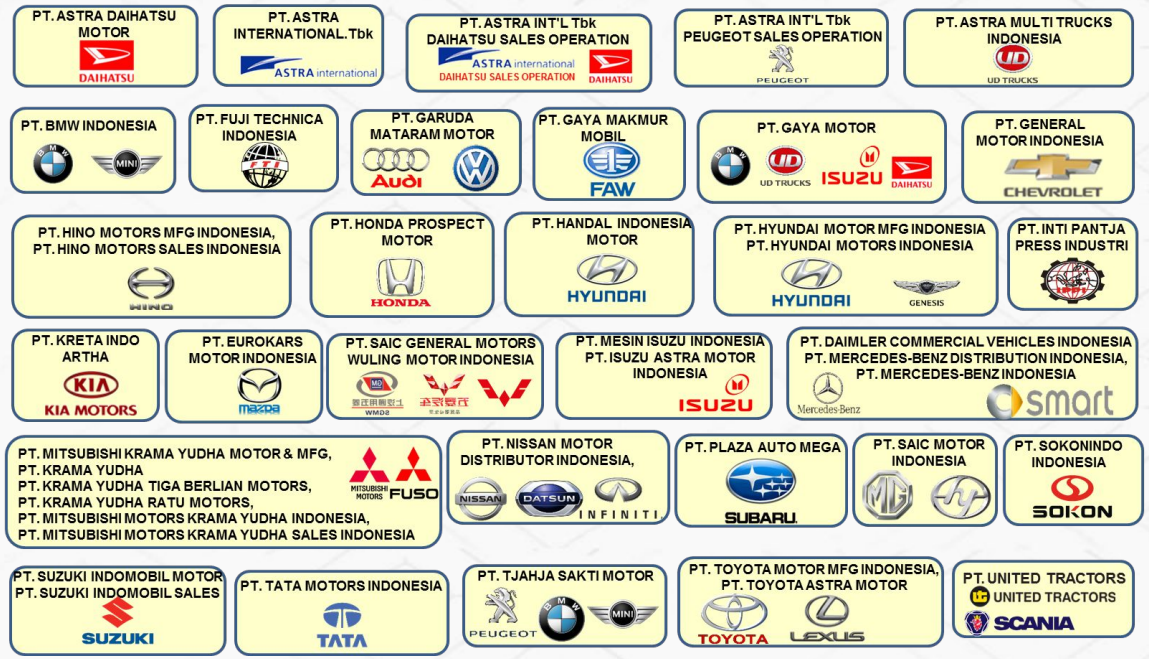

GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTO SHOW

05

Anugerah Pajak Jawa Barat
(Anugerah Philothra)

Bagi Wajib Pajak Taat Pajak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan membayar seluruh wajib pajak dengan memberikan apresiasi kepada para wajib pajak teladan

Minggu IV
November 2025

BUDGETING = 150 Juta

APBD : Rp. 150 Juta

Dihadiri oleh :

- Gubernur Jawa Barat
- Kapolda
- Sekertaris Daerah
- Tim Pembina Samsat

Output

Penghargaan kepada 25 orang wajib pajak teladan dari individu dan perusahaan se Jawa Barat

bapenda Jabar
Ayo Wargi
kita bangun Jabar
dengan cara membayar pajak tepat waktu!

HATUR NUHUN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan : Kawaluyaan Indah Raya Nomor : 6 Telepon : (022) 87328066
Faksimile : (022) 87327001 Website : www.bp2d.jabarprov.go.id E-mail : bp2d@ jabarprov.go.id
B A N D U N G - 40286

KALENDER KEGIATAN BP2D TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nama Pimpinan : Linda Al Amin, S.T., M.T.

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran/Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
1.	Webinar Penelitian dan Pengembangan Jawa Barat Juara (PENGEMBARA)	Januari - Desember	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait litbang di Kab/Kota di Jawa Barat beserta dengan mitra penelitian BP2D Jabar	100 Orang /Edisi
2.	Sosialisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Februari 2025	Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	100 Orang
3.	Forum Perangkat Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan	13 Februari 2025	1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat pengampi Bidang Penelitian dan Pengembangan 3. K/L/Perguruan Tinggi terkait	250 Orang
4.	West Java Research Forum	Febuari, April, Juni, Agustus, Oktober, November	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Stakeholder terkait tema (dilaksanakan 6 kali dengan tema yang berdeda sehingga sasaran/peserta disesuaikan dengan tema)	100 Orang
5.	Rakor Indeks Kualitas Kebijakan	5 Maret 2025	1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat terkait	150 Orang
6.	Sosialisasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)	April - Mei 2025	Seluruh calon peserta dengan kategori : 1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat 3. K/L/Perguruan Tinggi 4. BUMN/BUMD	300 Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3F18CAFC42
3F18CAFC42

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran/Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
7.	Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	April 2025	Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	100 Orang
8.	Kick Off Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)	April 2025	Seluruh calon peserta dengan kategori : 1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat 3. K/L/Perguruan Tinggi 4. BUMN/BUMD	300 Orang
9	Sosialisai Indeks Inovasi Daerah (IID)	April 2025	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	100 Orang
10.	Town Hall Meeting Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	18 Juni 2025	JFAK di Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jawa Barat	200 Orang
11.	Sosialisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	11 Juli 2025	1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat terkait	100 Orang
12.	West Java Research Summit (WJRS)	September 2025	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Stakeholder terkait tema (akan ditentukan kemudian)	200 Orang
13.	Awarding Kompetisi Inovasi Jawa Barat	September 2025	Seluruh calon peserta dengan kategori : 1. Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Jabar 2. Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat 3. K/L/Perguruan Tinggi 4. BUMN/BUMD 5. Stakeholder terkait	300 Orang

KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

LINDA AL AMIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya

3F18CAFC42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3F18CAFC42

AGENDA PELATIHAN BPSDM JABAR 2025

NO	NAMA PELATIHAN	PERKIRAAN JADWAL	METODE PENYELENGGARAAN	KETUA TIM	BIDANG
1	Layanan Dasar Sosial	Januari	Blended Learning	Jejen Hendra Permana	PKTI
2	Neuro Linguistic Program	Januari	Blended Learning	Salman Alfarisi	PKTI
3	Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan	Februari	Corpu	Nune Siti Yulandari	PKTI
4	Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	Februari	Blended Learning	Susi Susilawati	PKTI
5	Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Februari	Blended Learning	Sri Wulan Nurnaningsih	PKTI
6	Tata Kelola Layanan IT	Februari	Blended Learning	Insan Tania Guna	PKTI
7	Monev Kinerja dan Anggaran	Maret	Blended Learning	Reni Ambarsasri	PKTI
8	Teknis Perpustakaan	Maret	Blended Learning	Dalies Pujiyanti	PKTI
9	Ekonomi Kreatif	September	Blended Learning	Yoki Arinda	PKTI
10	Pariwisata Dasar	April	Blended Learning	Susi Susilawati	PKTI
11	Pemilihan Bibit Unggul dan Recording Pada Ternak Ruminansia	Mei	Blended Learning	Nune Siti Yulandari	PKTI
12	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Mei	Blended Learning	Rosita	PKTI
13	Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	Juni	Blended Learning	Mella Rizayanti	PKTI
14	Pengelolaan Arsip	Juni	Blended Learning	Salman Alfarisi	PKTI

15	Penanganan dan Pengendalian OPT Pada Komoditas Padi dan Cabai	Juli	Corpu	Yoki Arinda	PKTI
16	Pengelolaan Air Limbah di Instansi Pemerintah Berbasis Kompetensi	Juli	Blended Learning	Insan Tania Guna	PKTI
17	Project Assesment/ Kelayakan Proyek	Agustus	Blended Learning	Rosita	PKTI
18	Manajemen Pembangunan Patisipatif Masyarakat	Agustus	Blended Learning	Dalies Pujiyanti	PKTI
19	Manajemen Konflik	September	Blended Learning	Rosita	PKTI
20	Negotiation Skill Bagi Mediator Hubungan Industrial	September	Blended Learning	Tugiman	PKTI
21	Coaching Team: Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perhitungan Pajak Air Permukaan	Oktober	Blended Learning	Salman Alfarisi	PKTI
22	Sistem Informasi Geografis	Oktober	Blended Learning	Dalies Pujiyanti	PKTI
23	Pengelolaan Data Statistik	November	Corpu	Salman Alfarisi	PKTI
24	PPK Tipe B	Juni	Blended Learning	Rida Maulani	PKTU
25	PPK Tipe C	Juli, Oktober	Blended Learning	Rida Maulani	PKTU
26	PBJ Level 1	April, Mei, Agustus	Blended Learning	Rida Maulani	PKTU
27	Bahasa Inggris	Juni, November	Klasikal	Devy Irawati	PKTU
28	Pengelolaan Keuangan	September	Blended Learning	Andri Mariska	PKTU
29	Penyusunan Sakip	April	Blended Learning	Devy Irawati	PKTU
30	Transformasi Digital	April, Mei, Oktober	Blended Learning	Andospa Aldo Saputra	PKTU
31	Ideologi Pancasila Tingkat Dasar	Agustus	Blended Learning	Reni Ambar Sari	PKTU
32	Public Speaking	April	Blended Learning	Andri Mariska	PKTU

33	Critical Thinking	Agustus	Blended Learning	Andri Mariska	PKTU
34	Design Thinking	Juli	Blended Learning	Andri Mariska	PKTU
35	Manajemen Risiko	September	Blended Learning	Andospa Aldo Saputra	PKTU
36	Agen Perubahan	Mei, Juni, Agustus	Blended Learning	Andospa Aldo Saputra	PKTU
37	Penyusunan Akpk	Januari – Mei	Blended Learning	Sri Wahyuningsih	PKTU
38	Tata Naskah Dinas (MOOC)	Februari	MOOC	Andospa Aldo Saputra	PKTU
38	Mansoskul (MOOC)	Maret	MOOC Dan Blended Learning	Devy Irawati	PKTU
39	Analis Kebijakan	April, Mei	E-Learning	Andrian Desta Pratama	PKTU
40	Perencana	Juni	Blended Learning	Andrian Desta Pratama	PKTU
41	Advokasi Kebijakan	Agustus, September	Blended Learning	Andrian Desta Pratama	PKTU
42	Auditor / PPUPD	September	Blended Learning	Andrian Desta Pratama	PKTU
43	Refreshment Widyaiswara	Februari	Blended Learning	Sri Wahyuningsih	PKTU
44	Training Of Trainer Calon Pengajar	Oktober	Blended Learning	Sri Wahyuningsih	PKTU
45	PKP APBD Angkatan I	Januari - Juli 2025	Blended	Oris	PKM
46	PKP Pengiriman Angkatan II	12 Maret - 23 Juli 2025	Blended	Oris	PKM
47	PKP Pengiriman Angkatan III	7 April - 13 Agustus 2025	Blended	Oris	PKM
48	PKA APBD Angkatan I	17 April - 3 September 2025	Blended	Dede Hermawan	PKM
49	PKA Pengiriman Angkatan II	5 Mei - 10 September 2025	Blended	Dede Hermawan	PKM

50	PKN. Tk. II Angkatan I	15 April - 28 Agustus	Blended	Solehuddin	PKM
51	PKN. Tk. II Angkatan II	15 Juli - 20 November	Blended	Solehuddin	PKM
52	LATSAR Angkatan, 21,22.23,24 & 25	6 Agustus - 8 November 2025	Blended	Koko Kurniawan	PKM
53	PPPK JABAR Gelombang I Angkatan 1 S.D 5	16 - 30 Mei	Blended	Asep Mulyadi	PKM
54	PPPK JABAR Gelombang I Angkatan 6 S.D 10		Blended	Asep Mulyadi	PKM
55	PPPK JABAR Gelombang II Angkatan 11 S.D 15	30 Mei - 13 Juni	Blended	Asep Mulyadi	PKM
56	PPPK JABAR Gelombang II Angkatan 16 S.D 20		Blended	Asep Mulyadi	PKM
57	PPPK JABAR Gelombang III Angkatan 21 S.D 25	11 - 25 Juni	Blended	Asep Mulyadi	PKM
58	PPPK JABAR Gelombang III Angkatan 26 S.D 30		Blended	Asep Mulyadi	PKM
59	PPPK JABAR Gelombang VI Angkatan 31 S.D 35	26 Juni - 11 Juli	Blended	Asep Mulyadi	PKM
60	PPPK JABAR Gelombang VI Angkatan 36 S.D 40		Blended	Asep Mulyadi	PKM
61	PPPK JABAR Gelombang V Angkatan 41 S.D 45	11 Juli - 25 Juli	Blended	Asep Mulyadi	PKM
62	PPPK JABAR Gelombang V Angkatan 46 S.D 50		Blended	Asep Mulyadi	PKM
63	PPPK JABAR Gelombang VI Angkatan 51 S.D 55	25 Juli - 08 Agustus	Blended	Asep Mulyadi	PKM
64	PPPK JABAR Gelombang VI Angkatan 56 S.D 60		Blended	Asep Mulyadi	PKM
65	PPPK JABAR Gelombang VII Angkatan 61 S.D 65	06 Agustus - 20 Agustus	Blended	Asep Mulyadi	PKM
66	PPPK JABAR Gelombang VII Angkatan 66 S.D 70		Blended	Asep Mulyadi	PKM
67	PPPK JABAR Gelombang VIII Angkatan 71 S.D 75		Blended	Asep Mulyadi	PKM

68	PPPK JABAR Gelombang VIII Angkatan 76 S.D 80	22 Agustus - 05 September	Blended	Asep Mulyadi	PKM
69	PPPK JABAR Gelombang IX Angkatan 81 S.D 85	04 September - 19 September	Blended	Asep Mulyadi	PKM
70	PPPK JABAR Gelombang IX Angkatan 86 S.D 90		Blended	Asep Mulyadi	PKM
71	PPPK JABAR Gelombang X Angkatan 91 S.D 95	17 September - 031Oktober	Blended	Asep Mulyadi	PKM
72	PPPK JABAR Gelombang X Angkatan 96 S.D 100		Blended	Asep Mulyadi	PKM
73	TOT Narasumber Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Maret 2025	Blended	Octy	PKM
74	Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD	MEI - OKTOBER 2025	Blended	Ramos Namora	PKM

KALENDER KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran / Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
1	Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat	April	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
2	Parade Budaya Nusantara	Agustus	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
3	Kamonesan Milangkala	Agustus	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
4	Gelar Budaya Jabar *on Colour of Culture Festival*	Agustus	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
5	Parade Tari Nusantara	Oktober	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
6	Parade Musik Nusantara	September	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
7	Parade Lagu Nusantara	Desember	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
8	Festival Budaya Nusantara	Oktober	Seniman/Sanggar/Kab dan Kota	1 Sanggar Kab/Kota
9	Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembega	Januari - Desember	Perangkat Daerah/ Kementrian/ Lembaga	Tentatif
10	Fasilitasi Keprotokolan	Januari - Desember	Gubernur/ Sekda/ DPRD/ Assisten	Tentatif

Jakarta, Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Badan Pengubung
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku
ATASAN PPID PEMBANTU,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

MOCHAMMAD IMAM YUNIZHAR,S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I

Sub Bagian Tata Usaha selaku
PPID PEMBANTU,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

ANNA HIJRIANTI PRATIWI,S.T.
Penata Tingkat I

AGENDA KERJA TAHUN 2025
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama / Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran / Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
1	Pra 1 Forum OPD	4 - 5 Februari 2025	Kab/Kota Wilayah Timur	150
2	Pra 1 Forum OPD	10 - 11 Februari 2025	Kab/Kota Wilayah Barat	150
3	Forum OPD DBMPR	18 - 19 Februari 2025	Kab/Kota	300
4	Hari Bakti Pekerjaan Umum	3 Desember 2025	Kementrian,Lembaga dan Dinas yang berkaitan dengan Ke Puan Provinsi Jawa Barat	200

Bandung, 21 Januari 2025
Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM
Pembina Utama Madya

PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber	Anggaran	Lokasi
1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**34.231.025.960**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							
	Relasi Media	Fasilitasi Pendampingan Agenda Pimpinan	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	1.961.907.889	Jawa Barat
		Kontributor Media	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Jawa Barat
		Pengelolaan Pers Room	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Doorstop	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Jawa Barat
		Klarifikasi Pemberitaan	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Evaluasi Kerjasama POKJA Media	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Agustus, Desember	APBD		Kota Bandung
	Penyusunan Konten	In House Production and Publication	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	3.099.525.592	Kota Bandung
		eMagazine	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	April, Agustus, Desember	APBD		virtual
		Fasilitasi/Melaksanakan Livestreaming	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Liputan Kegiatan	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Produksi Konten Narasi Tunggal/ sesuai Strategi Komunikasi	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Penerbitan sertifikat JabarCorpU Talent dengan jumlah 3JP/sertifikat Kolaborasi dengan BPSDM Jabar	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Februari	APBD	1.050.970.000	Kota Bandung
		IKP Talks #1	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Februari	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #2	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Maret	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #3	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	April	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #4	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Mei	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #5	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Juni	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #6	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Juli	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #7	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Agustus	APBD		Kota Bandung
		Forum Virtual Kehumasan	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	September	APBD		Virtual
		IKP Talks #8	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Oktober	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #9	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	November	APBD		Kota Bandung
		IKP Talks #10	Kepala Bidang IKP	1 Laporan	Desember	APBD		Kota Bandung
	Diseminasi Informasi	VIRAL (Festival Literasi Digital) 2025	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	November	APBD	1.391.607.388	Kota Bandung
		IKP fest	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Juni	APBD		Kota Bandung
		Pemutakhiran Data akun-akun resmi milik Pemerintah Kota/Kabupaten, Perangkat Daerah	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Februari	APBD		Virtual
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Menyusun Strategi Komunikasi Program Prioritas/ Strategis Pemdaprov Jawa Barat	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	600.120.000	Kota Bandung
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik	Kepala Bidang IKP	12 Laporan	Januari - Desember	APBD	4.345.493.847	Kota Bandung
		Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Juli - November	APBD		Kota Bandung
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Aktivasi dan Peningkatan Kapasitas SDM KIM Desa	Kepala Bidang IKP	20 Orang	Mei, Juni, Juli, Agustus, September,	APBD	306.272.000	Kota Bandung
		Merancang bahan/kanal diseminasi informasi kebijakan/program pemerintah	Kepala Bidang IKP	10 Kanal	Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember	APBD		Kota Bandung
		Kompetisi KIM Jabar	Kepala Bidang IKP	20 KIM	Mei - Juni	APBD		Kota Bandung
		Pelaksanaan permodelan collab kemitraan diseminasi informasi dengan KIM terpilih	Kepala Bidang IKP	10 KIM Desa	Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember	APBD		Kota Bandung
		Evaluasi Kolaborasi KIM Jabar	Kepala Bidang IKP	10 KIM Desa	November	APBD		Kota Bandung
	Pelayanan Informasi Publik	Menentukan informasi publik yang dapat diakses dan dipublikasikan;	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari-Desember	APBD	508.491.388	Kota Bandung
		Pengujian tentang konsekuensi daftar informasi yang akan dikecualikan;	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari-Desember	APBD		Kota Bandung
		Verifikasi dokumen informasi publik;	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari-Desember	APBD		Kota Bandung
		Pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Januari-Februari	APBD		Kota Bandung
		Monev PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Kepala Bidang IKP	1 Dokumen	Agustus-November	APBD		Kota Bandung
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Aduan Terintegrasi	Kepala Bidang IKP	12 Laporan	Januari - Desember	APBD	4.952.027.800	Virtual
		Literasi Digital pada institusi pendidikan Tingkat Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas/Kejuruan	Kepala Bidang IKP	500 orang	April, Mei, Agustus, Sept, Oktober	APBD		Jawa Barat
		Penguatan Kolaborasi JSH (Jabar Saber Hoaks) dengan USHD (Unit Saber Hoaks Daerah)	Kepala Bidang IKP	54 Orang	Februari, Mei, Agustus, November	APBD		Jawa Barat
		Kejar Tabayun dan Milarian Fakta JSH	Kepala Bidang IKP	54 Orang	Februari, Mei, Agustus, November	APBD		Jawa Barat
		Penguatan kemitraan dengan KPID dalam upaya mengawal penyiaran yang sehat/berkualitas di Jawa Barat	Kepala Bidang IKP	4 Laporan	Maret, Juni, September, Desember	APBD		Jawa Barat

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Placement Program Prioritas/ Unggulan Pemprov Jawa Barat pada Media Nasional dan Regional	Kepala Bidang IKP	20 Media	Januari - Desember	APBD	16.014.610.056	Kota Bandung
		Placement Program / Kebijakan / Kegiatan Gempur Rokok Ilegal pada Media Nasional dan Regional	Kepala Bidang IKP	4 Media	Juni - Desember	DBHCHT		Kota Bandung
2	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**96.507.629.383**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Perpanjangan Lisensi Mail Server	Kepala Bidang Aptika	1 lisensi	Februari	APBD	2.852.711.524	Kota Bandung
		Perpanjangan Lisensi Fortimal	Kepala Bidang Aptika	1 lisensi	Mei	APBD		Kota Bandung
		Pengembangan Aplikasi Sidebar	Kepala Bidang Aptika	1 aplikasi	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Pengembangan Aplikasi SADARKAJABAR (+PODES)	Kepala Bidang Aptika	1 aplikasi	Januari - Desember	APBD		Kota Bandung
		Capacity Building Bidang Aptika	Kepala Bidang Aptika	27 Kab/Kot	Semester 2	APBD		Kab. Bandung
		Capacity Building Pengelola Aplikasi	Kepala Bidang Aptika	38 PD	Semester 1	APBD		Kota Bandung
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						**93.654.917.859**	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Menyusun dokumen arsitektur SPBE	Kepala Bidang E-Government	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	519.800.000	Kota Bandung
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen SPBE bersama perangkat daerah	Kepala Bidang E-Government	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	52.811.251.079	Kota Bandung
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas	Kepala Bidang E-Government	2 Dokumen	Januari - Desember	APBD	1.373.691.592	Kota Bandung
	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Menyediakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jawa Barat	Kepala Bidang E-Government	27 Kabupat	Januari - Desember	APBD	1.046.055.708	Kota Bandung
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Mengkoordinasikan Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kepala Bidang E-Government	100 Persen	Januari - Desember	APBD	184.448.000	Kota Bandung
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kepala Bidang E-Government	1 Dokumen	Januari - Desember	APBD	249.992.400	Kota Bandung
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Memfasilitasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE	Kepala Bidang E-Government	1 Laporan	Desember	APBD	249.100.000	Kota Bandung
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Memfasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Diskominfo	Kepala Bidang E-Government	3 Dokumen	Januari - Desember	APBD	37.900.000	Kota Bandung
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Menyediakan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kepala Bidang E-Government	456 Perang	Januari - Desember	APBD	17.250.679.080	Kota Bandung
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Menyediakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Kepala Bidang E-Government	456 Perang	Januari - Desember	APBD	19.932.000.000	Kota Bandung
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kegiatan Datathon	Kepala UPTD PLDDIG	1 Kegiatan	September	APBD	85,340,000	Kota Bandung
		Pengembangan Produk pada Tribe Ekosistem Data Jabar	Kepala UPTD PLDDIG	1000 Dataset	Januari - Desember	APBD	6,292,168,135	Kota Bandung
		Pengelolaan Geolokasi IP	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	59,496,000	Kota Bandung
		Pengelolaan Server Data	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	22,977,000	Kota Bandung
		Pembuatan Mockup pada Dashboard	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	2,637,360	Kota Bandung
		Mengumpulkan data dan feedback dari Pengguna	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	101,232,000	Kota Bandung
		Analisis dan Pembuatan Visualisasi Data	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	490,176,000	Kota Bandung
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rakor Layanan Publik	Kepala UPTD PLDDIG	48 OPD dan 27 Ko/Kab	Agustus	APBD	306,500,000	Kota Bandung
		Pengembangan Produk pada Tribe Citizen Engagement Services	Kepala UPTD PLDDIG	3 Aplikasi	Januari - Desember	APBD	10,543,824,908	Kota Bandung
		Hostling Aplikasi pada Public Cloud	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	199,800,000	Kota Bandung
		Analisis dan Debugging Aplikasi	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	255,715,140	Kota Bandung
		Penerapan AI Pada Aplikasi	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	170,496,000	Kota Bandung
		Pelaksaan Riset dan Desain Aplikasi	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	207,470,100	Kota Bandung
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	TechUpdate dan JDA Talks	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	156,000,000	Kota Bandung
		Penerapan ISO 20.000-1:2018	Kepala UPTD PLDDIG	1 Kegiatan	Januari - Desember	APBD	144,000,000	Kota Bandung
		Rakor Hotline	Kepala UPTD	27 Ko/Kab	Oktober	APBD	141,300,000	Kota Bandung
		Pengembangan Produk pada Tribe Citizen Impact Program	Kepala UPTD PLDDIG	90% SLA Layanan	Januari - Desember	APBD	6,199,593,290	Kota Bandung
		Berlangganan Iklan Digital	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	125,879,994	Kota Bandung
		Pengelolaan Desain dan Konten	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	137,444,640	Kota Bandung
		Pengelolaan Command Center	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	441,269,400	Kota Bandung
		Pengelolaan Hotline	Kepala UPTD PLDDIG	12 Bulan	Januari - Desember	APBD	96,903,000	Kota Bandung
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**2.394.029.210**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi							
	Penginglkatan Kapasitas Kelembagaan							
	Pelatihan Jawara Data Geospasial	Pelatihan terkait Geospasial untuk Jawara Data Provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang Statistik	38 Perangkat Daerah	Juli	APBD	200.000.000	Kota Cimahi
	Pelatihan Jawara Data Statistik	Pelatihan terkait Statistik Sektoral untuk Jawara Data Provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang Statistik	38 Perangkat Daerah	Juli	APBD		Kota Cimahi
	Diklat Teknis Statistik	Pelatihan Dasar-Dasar Statistik di Pusdiklat BPS	Kepala Bidang Statistik	16 Jawara Data	Juni	APBD		Jakarta
	Pelatihan Ekonometrika	Pelatihan Mengenai Ekonometrika	Kepala Bidang Statistik	20 orang	Oktober	APBD		Zoom Meeting

	Pelatihan Google Earth Engine	Pelatihan mengenai Google Earth Engine	Kepala Bidang Statistik	20 orang	Oktober	APBD		Zoom Meeting
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral							
	Desk DDA	Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka 2025	Kepala Bidang Statistik	62 Dataset	Januari	APBD	300.000.000	Kota Bandung
	Konsinyering LKPJ	Pengumpulan Data LKPJ	Kepala Bidang Statistik	1 Buku Data LKPJ	Februari	APBD		Kab.Bandung
	Pemutakhiran Satu Data	Pemutakhiran Data Provinsi Jawa Barat di Aplikasi Satu Data Jabar	Kepala Bidang Statistik	1000 Dataset	April, September	APBD		Kota Cimahi
	Pemutakhiran Satu Peta	Pemutakhiran Peta Provinsi Jawa Barat di Aplikasi Satu Data Jabar	Kepala Bidang Statistik	215 Mapset	Juni	APBD		Kab.Bandung
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							
	Webinar	Webinar Statistik	Kepala Bidang Statistik	6 Webinar	Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember	APBD	248.735.220	Zoom Meeting
	Desk E-Walidata	Pelaksanaan Desk dan pengumpulan data di aplikasi E-walidata	Kepala Bidang Statistik	1 Dokumen	May	APBD		Kota Bandung
	Geostat Expo	Melaksanakan Pameran Kegiatan Statistik dan Geospasial Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik	1 kali	Oktober	APBD		Kota Bandung
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar							
	Updating Metadata Statisik	Pembuatan Metadata Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik	365 Metadata	April	APBD	200.000.000	Kota Cimahi
	Pembahasan Kode Referensi	Pembuatan kode referensi provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang Statistik	1 Dokumen	Juni	APBD		Kota Bandung
	Pengajuan Rekomendasi	Membuat rekomendasi statistik untuk kegiatan statistik di provinsi Jawa Barat yang belum diajukan rekomendasi statistik	Kepala Bidang Statistik	38 Perangkat Daerah	Mei	APBD		Kota Bandung
	Penyusunan Standar Data	Pembuatan Standar Data provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang Statistik	1 Dokumen	April	APBD		Kota Bandung
	Pengumpulan Eviden EPSS	Rapat Pengumpulan Eviden EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	Kepala Bidang Statistik	1 Dokumen	Februari	APBD		Kota Bandung
	Finalisasi Eviden EPSS	Rapat Finalisasi untuk mengumpulkan eviden EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	Kepala Bidang Statistik	1 Kali	April	APBD		Kota Bandung
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia							
	Rakor Satu Data dan Satu Peta Jawa Barat	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Koto	Kepala Bidang Statistik	1 kali	Juni	APBD	1.445.293.990	Kab.Bandung
	Updating Metadata Geospasial	Pembuatan Metadata Geospasial	Kepala Bidang Statistik	205 Metadata	Juli	APBD		Kab.Bandung
	Supervisi Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Supervisi Kabupaten Kota terkait Statistik	Kepala Bidang Statistik	5 Lokus	Juli	APBD		27 Kabupaten/Kota
	Supervisi Sadarkajabar	Pelaksanaan Supervisi Kabupaten Kota terkait Aplikasi Sadarka Jabar	Kepala Bidang Statistik	5 Lokus	Agustus	APBD		27 Kabupaten/Kota
	Forum Satu Peta	Melaksanakan Forum pembahasan Satu Peta atau Data Geospasial	Kepala Bidang Statistik	1 kali	September	APBD		Kab.Garut
	MBKM	Melaksanakan kerjasama magang antara Upi dengan perangkat Daerah	Kepala Bidang Statistik	2 kali	Juli, Desember	APBD		Kota Bandung
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**2.811.083.420**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan Pedoman Tata Kelola Keamanan Informasi	Kepala Bidang Sandikami	1 Dokumen	Januari s.d. Desember	APBD	143.688.500	Kota Bandung
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis Drill Test	Kepala Bidang Sandikami	1 Kegiatan	April	APBD	592.742.000	Kota Bandung
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	Pendampingan ISO	Kepala Bidang Sandikami	1 Dokumen	Januari s.d. Desember	APBD	1.627.987.720	Kota Bandung
		Pelatihan Audit Internal ISO	Kepala Bidang Sandikami	1 Kegiatan	Mei	APBD		Kota Bandung
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Webinar Sandikamimania	Kepala Bidang Sandikami	12 Kegiatan	Januari s.d. Desember	APBD	146.995.000	Kota Bandung
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						**299.670.200**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rakor Jaring Komunikasi Sandi	Kepala Bidang Sandikami	27 Kab/Kota	Maret	APBD		Kota Bandung
		Layanan Kontra Penginderaan	Kepala Bidang Sandikami	5 Perangkat Daerah	Oktober	APBD	299.670.200	Kota Bandung

LAMPIRAN VII KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243 / KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025

TENTANG : AGENDA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025

AGENDA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran (Rp)
1.	MUMTAZ 2025	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Juli 2025	1.185.069.000 (APBD)
2.	Hari Koperasi ke-78	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Gerakan koperasi Jawa Barat, Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi	12 Juli 2025	676.000.000 (APBD)
3.	Lauching Kredit Caang	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Juli-Agustus 2025	25.000.000.000 (APBD)
4.	Inkubator Delta 2025	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Oktober 2025	1.500.000.000 (APBD)
5.	Gelar Produk Koperasi dan Temu Kemitraan	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Gerakan koperasi Jawa Barat, Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi	Oktober 2025	1.000.000.000 (APBD)

Bandung, 23 Januari 2025

Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda

9E004B02CF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E004B02CF

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran/Peserta
1	Peringatan Hari Desa Nasional	14 - 15 Januari 2025	Seluruh desa dan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang
2	Pembekalan Pra Tugas Patriot Desa dan SSPMD Tahun 2025	22 - 23 Januari 2025	Patriot Desa dan SSPMD
3	Forum Perangkat Daerah	18 - 19 Februari 2025	Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jabar dan Kepala DPMD Kabupaten/Kota
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat di DAS Citarum (Daring)	Maret 2025	Masyarakat sekitar DAS Citarum
5	Rapat Koordinasi LKD	Juli 2025	Lembaga Kemasyarakatan Desa
6	Hibah Penunjang TMMD ke-123, ke-124, ke-125, dan ke-126	April 2025	Aparat TNI dan desa
7	Monitoring Terpadu Bidang KPPM	Mei, Agustus, November 2025	Penerima manfaat program
8	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Oktober 2025	Stakeholder Kelembagaan Masyarakat
9	Reorientasi Tematik Patriot Desa	Maret, Mei, Juli, September, November 2025	Patriot Desa dan SSPMD
10	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa (Daring)	Aprli, Juni, Agustus, Oktober 2025	Masyarakat desa
11	Festival Desa Kabupaten	Oktober - Desember 2025	Masyarakat desa
12	Rapat Koordinasi Lembaga Adat Desa	Februari 2025	DPMD se-Kabupaten dan Perangkat Daerah Kota yang menaungi Masyarakat Adat
13	Jambore Masyarakat Adat	April 2025	500 Masyarakat Adat Jawa Barat
14	Rakor Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat	11/12 Februari 2025	30 Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pembina Posyandu
15	Rakor Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Jawa Barat	April 2025	Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
16	Peningkatan Kapasitas Pendamping Posyandu	April - Mei 2025	654 Pendamping Posyandu
17	Peningkatan Kapasitas bagi 27 Model Posyandu Center of Excellence (CoE) di 5 Wilayah	Juli - September 2025	27 Model Posyandu CoE
18	Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Desa	Februari 2025	Seluruh desa di Jawa Barat

19	Rapat Sosialisasi Barang dan Jasa Desa, Mekanisme Pengajuan Permohonan Pencairan Bankeudes melalui SIPD	Februari dan April 2025	Seluruh desa di Jawa Barat
20	Sosialisasi Aplikasi Tapal Desa	September 2025	
21	Sosialisasi Perdes Tata Ruang Desa	September 2025	Seluruh desa di Jawa Barat
22	Sosialisasi Tata Ruang Desa	Oktober 2025	Seluruh desa di Jawa Barat
23	Sosialisasi Leuit Desa	November 2025	
24	Rapat Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa	November 2025	Seluruh desa di Jawa Barat
25	Rapat persiapan lomba dan gelar TTG Provinsi dan Nasional tahun 2025	Januari 2025	Panitia Lomba TTG tingkat provinsi dan nasional
26	Lomba TTG Tingkat Provinsi Tahun 2025	April 2025	Peserta Lomba TTG tingkat provinsi
27	Lomba TTG Tingkat Nasional Tahun 2025	Mei 2025	Peserta Lomba TTG tingkat nasional
28	Gelar TTG Nusantara Tahun 2025 Banten	Juni 2025	Para pemenang Lomba TTG tingkat provinsi per kategori

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Sumatera Nomor 50, Bandung, Jawa Barat 40115,
Telepon (022) 4237369, Faksimile (022) 4237081, Laman dp3akb.jabarprov.go.id

AGENDA KERJA DP3AKB JABAR TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran/Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
1	Forum OPD Urusan PPPA	Februari 2025	Instansi dan Stakeholder terkait	100 orang
2	Rakor Puspaga Kab/Kota di Jawa Barat	Februari 2025	Pengurus Puspaga Kab/Kota di Jawa barat	100 orang
3	Bimtek MOTEKAR	Maret 2025	Petugas Motekar Kab/Kota di Jawa Barat	200 orang
4	Kampanye STOPAN JABAR	Maret 2025	Petugas Teladan KB	200-300 orang
5	Webinar Ketahanan Keluarga	Juni 2025	Petugas Teladan KB	300 orang
6	Peningkatan Kapasitas FAD	Juni 2025	Pengurus FAD Jabar	100 orang
7	Peringatan Hari Keluarga Nasional 2025	Juni 2025	Masyarakat Jawa Barat	200 orang
8	Peringatan Hari Anak Nasional 2025	Desember 2025	Pengurus FAD Jabar	20 orang
9	Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)	Juni 2025	Perangkat Daerah di Jawa Barat	100-150 orang
10	Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat	November 2025	Peserta perempuan di Jawa Barat	100-150 orang
11	Peringatan Hari Ibu 2025	Desember 2025	Perangkat Daerah di Jawa Barat	200-300 orang

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1	Forum Perangkat Daerah	Sekretariat	1 Kegiatan	Feb - Mar	100,000,000.00
2	Angkutan Lebaran	Seluruh Unit Kerja	1 Kegiatan	Mar	3,000,000,000.00
3	Hari Perhubungan Nasional	Seluruh Unit Kerja	1 Kegiatan	Sep	50,000,000.00
4	Angkutan Natal dan Tahun Baru	Seluruh Unit Kerja	1 Kegiatan	Des	2,000,000,000.00

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

DHANI GUMELAR, S.T., M.T.
Pembina Tk. I

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi							
	Penyusunan RPIP	Sosialisasi Penyusunan RPIK	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	50 orang	Februari	APBD	Rp11,631,400	Zoom Meeting
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Forum temu bisnis dalam rangka Kemitraan Industri Garam	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	40 Pelaku Usaha	Mei	APBD	Rp146,853,010	Kota Bandung
		Forum temu bisnis dalam rangka Kemitraan Industri Tekstil	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	40 Pelaku Usaha	Juli	APBD		Kota Bandung
		Forum temu bisnis dalam rangka Kemitraan Industri Otomotif	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	40 Pelaku Usaha	Oktober	APBD		Kota Bekasi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Sosialisasi Vokasi Industri dan Super Tax Deduction (2 kali)	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	200 industri di Jawa Barat	Penyesuaian jadwal dengan BPSDMI Kemenperi karena ini kerjasama dengan kemenperin	APBD	Rp14,490,000	Zoom Meeting
		Coaching Clinic Super Tax Deduction	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	60 Industri yang sudah memiliki mitra vokasi industri d Jawa Barat		APBD	Rp14,490,000	Zoom Meeting
		Pelatihan Pelatih di Tempat Kerja (2 kali)	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	40 Industri di Jawa Barat		APBD	Rp410,718,000	Kota Bandung
		Pelatihan Cost & Benefit Analysis untuk Industri	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	20 Industri di Jawa Barat		APBD	Rp52,523,000	Kota Bandung
		Pelatihan Awareness ISO 9001:2015	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	40 IKM di Jawa Barat	Mei	APBD	Rp58,741,000	Kota Bandung
		Pelatihan Excel bagi Laporan Industri dan Keuangan IKM (2 kali)	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	70 IKM di Jawa Barat	Mei & Agustus	APBD	Rp41,930,000	Kota Bandung
		Pelatihan Desain Grafis bagi Penyusunan Katalog & Company Profile IKM (2 Kali)	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	70 IKM di Jawa Barat	Juli & September	APBD	Rp41,930,000	Kota Bandung
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**							
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							
	Pengawasan Perizinan Berusaha Industri	Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Industri	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	100 Industri Besar di Jawa Barat	Februari	APBD	Rp11,216,000	Zoom Meeting
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Sosialisasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS dan SIINas) Ke Pelaku Usaha	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	200 Pengelola Kawasan Industri dan Industri Besar di Jawa Barat	Februari	APBD	Rp86,584,000	Kota Bekasi dan Online
3	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri							
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pameran Regenerasi Petani di DKI Jakarta	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	24 Regenerasi Petani	November	APBD	189,465,000	DKI Jakarta
		Pameran dan Misi Dagang Regenerasi Petani di Luar Provinsi	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6 Regenerasi Petani	Juli	APBD	336,248,833	Prov. Bali
		Pasamoan	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	25 Pelaku Usaha	Mei	APBD	100,000,000	Jawa Barat
		Pasamoan bersama Koncer (optimalisasi BIJB)	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	20 Pelaku Usaha	April	APBD	129,546,567	Waduk Dharma Kab. Kuningan
		Pasamoan bersama WJF	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	40 Pelaku Usaha	Agustus	APBD	149,682,300	Kota Bandung
		Pasamoan bersama WJX	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	40 Pelaku Usaha	Oktober	APBD	149,694,800	Kota Bandung

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri							
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Bimbingan Teknis Digital Marketing Regenerasi Petani	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	100 Regenerasi Petani	Mei	APBD	100,000,000	Prov. Jawa Barat
		Pameran Regenerasi Petani di Fasilitas Umum	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	40 Regenerasi Petani	Juni	APBD	220,000,000	Kota Bandung
		Business matching dalam Negeri	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6 Pelaku Usaha	November	APBD	150,610,072	Prov. Kalimantan Timur
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	82 Peserta Didik, Generasi muda dan/atau masyarakat umum	September	APBD	69,487,400	Kota Bandung
4	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**							
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas							
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	54 Pengelola Pasar Rakyat	Juli	APBD	68,930,000	Kabupaten Bandung
		Fasilitasi SNI Pasar Rakyat	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	10 Pasar Rakyat di Jawa Barat	Februari - Oktober	APBD	377,470,000	10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
		Monev Sarana Perdagangan	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Sarana Perdagangan (Pasar Rakyat dan PDP) di Jawa Barat	Februari - Desember	APBD	99,192,600	27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Fasilitasi Pasar Lelang Jawa Barat	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	35 Pelaku Usaha	Agustus	APBD	40,310,000	Kota Bandung
		Koneksitas dan Business Matching	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	4 Pelaku Usaha	September - Oktober	APBD	36,376,000	Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah
		Identifikasi Pelaku Usaha Potensial	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	10 Pelaku Usaha	April - November	APBD	28,071,500	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Sosialisasi Pengelolaan SRG	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	54 Pengelola Gudang dan Dinas yang membidangi perdagangan	Juni	APBD	38,492,000	Kota Bandung
		Monitoring Gudang SRG dan Non SRG	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	13 Pengelola Gudang	April - Desember	APBD	31,134,000	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
5	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**							
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI)	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Masyarakat di Kabkota	Maret, Mei, Desember	APBD	Rp. 15.323.810.000	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
6	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**							
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Vertek SIUP Bahan Berbahaya	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku Usaha	Februari - Desember	APBD	27,068,000	Kabupaten/Kota di Jawa Barat

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi Minol	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	30 Pelaku Usaha	April	APBD	23,640,000	Kota Bandung
		Vertek Minuman Beralkohol	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha	Februari - Desember	APBD	19,140,000	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
7	**PENGEMBANGAN EKSPOR**							
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kab/kota dalam provinsi							
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	West Java Expo 2025	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	70 Pelaku Usaha	Oktober	APBD	1,403,727,500	Jawa Barat
		World Expo Osaka 2025	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2 Pelaku Usaha	Mei	APBD	161,450,000	Jepang
		Cafex Expo-Mesir	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2 Pelaku Usaha	Mei	APBD	219,710,500	Maroko
		TEI	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	4 Pelaku Usaha	Oktober	APBD	256,513,500	Tangerang
		WORLD OF COFFEE - INDONESIA	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2 Pelaku Usaha	Mei	APBD	220,707,500	Jakarta
		TEI Regenerasi Petani	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2 Pelaku Usaha	Oktober	APBD	100,345,500	Tangerang
		Thailand Mega Show	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	2 Pelaku Usaha	Juli	APBD	250,000,000	Thailand
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	BME	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	30 Pelaku Usaha	April	APBD	51,300,000	Jawa Barat
		Pengembangan Kualitas SDM Pelaku Usaha Jawa Barat	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	90 Pelaku Usaha	Februari, April, Oktober	APBD	313,092,000	Jawa Barat
8	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**							
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Sinkronisasi Perdagangan Luar Negeri	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	50 Pelaku usaha/Aparatur /Kegiatan	Maret, Mei, Juli, agustus, September	APBD	66,297,500	Jawa Barat
		Sosialiasi Pemanfaatan SKA	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	50 Pelaku Ekspor	September	APBD	38,510,000	Jawa Barat
		Annual Forum Meeting	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	100 Stakeholder terkait (pelaku usaha, akademisi, aparatur, pusat)	November	APBD	63,380,000	Jawa Barat
		High Level Meeting	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	140 Stakeholder terkait (pelaku usaha, akademisi, aparatur, pusat)	November	APBD	117,254,000	Jawa Barat
		Monitoring Rex	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Eksportir	April - Agustus, Oktober, November	APBD	23,196,750	Jawa Barat
9	**PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	47 Dinas indag Kab/Kota, Dinas Pertanian Kab/Kota, Pelaku usaha pupuk	Februari	APBD	32,528,000	Bandung
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pelaku Usaha	Maret, Mei, Juli, agustus, Oktober	APBD	20,247,000	1. Kab. Indramayu 2. Kab. Sumedang 3. Kab. Garut /Kab. Tasikmalaya 4. Kab. Karawang 5. Kab. Kuningan
10	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Tertib Niaga (Berkala dan Terpadu)		Pelaku Usaha	Januari - Desember	Tbc	222,036,848	27 Kab/Kota
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pembelian Sampel		Pelaku Usaha	Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, agustus, Desember	Tbc	12,425,780	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengujian Sampel	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Lab Pengujian Terakreditasi	Februari, mei, juni, juli, agustus	APBD	17,980,000	Kota Bandung, Kota Depok
		Pengawasan Perbatasan	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pelaku Usaha	Oktober, November	APBD	19,278,000	Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran, Kab. Tegal. Kab. Lebak, Kab. Bogor, Kota Tangerang Selatan
		Rapat Persiapan Pengawasan Terpadu	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50 orang (Distanhor, DKPP, BPOM, POLDA)	Desember	APBD	3,250,000	Kota Bandung
		Koordinasi dan Konsultasi ke Kemendag	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kemendag	Februari, april, juli, oktober	APBD	11,750,000	DKI Jakarta
		Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	60 Indag Kab/Kota	Februari	APBD	30,865,000	Kota Bandung
		Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50 orang (Pelaku Usaha, Indag Kab/Kota, DPMPTSP)	November	APBD	10,150,000	Kota Bandung
11	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							
	Fasilitasi Penangan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Laporan Pengaduan, Pengawasan Khusus	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pelaku Usaha	Januari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November	APBD	16,224,800	27 Kab./Kota
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Sosialisasi konsumen cerdas	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1250 Siswa/siswi, karang taruna, anggota PKK dan masyarakat umum	Februari, Mei - November	APBD	Rp 12,705,000	Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cirebon
		Koncer Festival	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	580 karang taruna, anggota PKK dan masyarakat umum	April	APBD	Rp 264,683,000	Kabupaten Kuningan
12	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Inacraft	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Februari	APBD	Rp 300,000,250	JCC
		Diversifikasi (Sosialisasi)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	30 Industri Kecil dan Menengah	Februari	APBD	Rp 5,645,100	Bandung
		Rakor IKMA	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri		Februari	APBD	Rp 190,470,000	Bandung
		Diversifikasi (Kurasi)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	30 Industri Kecil dan Menengah	Maret	APBD	Rp 17,883,800	Bandung
		Diversifikasi (R&D)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	30 Industri Kecil dan Menengah	Maret	APBD	Rp 97,578,100	Bandung

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
		Diversifikasi (Awarding)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	3 Industri Kecil dan Menengah	Juli	APBD	Rp 23,250,000	Bandung
		Rabu Ngelmu	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	100 Industri Kecil dan Menengah	Februari - November	APBD	Rp 25,430,000	Bandung
		Kamis Geulis	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	100 Industri Kecil dan Menengah	Februari - November	APBD	Rp 19,569,750	Bandung
		HUT Dekranasda	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Mei	APBD	Rp 63,659,400	Tbc
		Promosi Bersama	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Mei, Juli, Agustus, September, Oktober	APBD	Rp 118,130,600	Tbc
		Katalog Rajut	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Juni	APBD	Rp 35,097,000	Tbc
		PKJB	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Juli	APBD	Rp 500,000,000	Bandung
		Dekranasda Award	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Juli	APBD	Rp 44,320,000	Tbc
		Partisipasi Pameran	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Agustus	APBD	Rp 134,038,500	Tbc
		Kriya Nusa	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	APBD	Rp 97,020,600	Tbc
		Bimtek TTG	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	25 Industri Kecil dan Menengah	November	APBD	Rp 78,252,500	Tbc
		Bimtek Pengelolaan Industri Hijau bagi IKM di Jawa Barat	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April - September	APBD	Tbc	Tbc
		Sosialisasi Industri Hijau di DAS Cilamaya	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Juni	APBD	Tbc	Tbc
		Monitoring dan Evaluasi Implementasi Industri Hijau	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Maret - November	APBD	Tbc	Tbc
		Penghargaan IKM Hijau Jawa Barat	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	November	APBD	Tbc	Tbc
		Bimtek Redrying Tembakau Krosok	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April - Juli	DBHCHT	Rp 405,651,800	Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Fasilitasi Halal (Bimtek/Sosialisasi)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April - Juli	APBD	Tbc	Tbc
		Fasilitasi Halal (Penyerahan)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Oktober	APBD	Tbc	Tbc
		Fasilitasi HKI Merek (Sosialisasi)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Mei	APBD	Tbc	Tbc
		Fasilitasi TKDN (Sosialisasi rekrutmen peserta)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Februari - Juni	APBD	Tbc	Tbc
		Fasilitasi TKDN (Sosialisasi pemberkasan dokumen 20 peserta)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Februari - November	APBD	Tbc	Tbc
		Fasilitasi Nutrition Fact (Sosialisasi Nutrition Fact 1)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Februari - September	APBD	Tbc	Tbc

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/ Kegiatan	Aktivitas	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Besar Anggaran	Lokasi
		Fasilitasi Nutrition Fact (Pelatihan penggunaan nutrition fact pada produk)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Februari - November	APBD	Tbc	Tbc
		Masterplan dan DED Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Agustus, September	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April - Juli	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Apraisal Penambahan Ruang Lingkup Laboratorium Pengujian	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Agustus	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Koordinasi ke Pusat	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Workshop Pelinting Rokok Tahap Pemula	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Workshop Perajangan Tembakau Tahap Pemula	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Rakor DBHCHT	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Workshop dan Business Matching Produk Turunan industri Hasil Tembakau	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Good Corporate Governance (SIHT)	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Pembelian Smoking Mesin Test	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Tbc	DBHCHT	Tbc	Tbc
		Sosialisasi TKDN bagi Industri	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	100 IKM	Februari	APBD	Tbc	Tbc
		Pendampingan TKDN bagi Industri Kecil	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	140 Industri Kecil	Maret, Juni, Juli	APBD	Tbc	Tbc
		Business Matching	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	40 IKM yang sudah memiliki sertifikat TKDN	April	APBD	Tbc	Tbc
		Rapat Koordinasi P3DN	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	100 Aparatur negara pada OPD Jawa Barat	November	APBD	Tbc	Tbc
13	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**							
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Bimtek SIINas untuk Kab/Kota	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April	APBD	Tbc	Tbc
		Bimtek Pendaftaran Akun SIInas bagi IK	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	April - Oktober	APBD	Tbc	Tbc
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Pemantauan SIINas ke Industri	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Maret - November	APBD	Tbc	Tbc
		Sosialisasi pelaporan di SIINas	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Juli	APBD	Tbc	Tbc
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pembuatan Leaflet	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Maret	APBD	Tbc	Tbc
		Pembuatan Buku	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Tbc	Desember	APBD	Tbc	Tbc

Lampiran 1. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Nomor : 368/KOM.05.04/Sekre
Tanggal : 22 Januari 2025
Perihal : Agenda Program/Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Banglin, BPP	100%	Januari – Desember 2025	DBHCHT & PAD 8.555.786.957
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat, BPP, BPPBP, BPSBP	100%	Januari – Desember 2025	DBHCHT & PAD 65.780.133.228
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Banglin, PPUP, BPPBP	100%	Januari – Desember 2025	DBHCHT & PAD 9.053.476.652
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPUP, Produksi, BPPBP, BPSBP	100%	Januari – Desember 2025	DBHCHT & PAD 19.807.370.038
5	Program Penyuluhan Pertanian	SDP, UPTD BPP, BPPBP, BPSBP	100%	Januari – Desember 2025	DBHCHT & PAD 6.409.388.084
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	PPUP	100%	Januari – Desember 2025	PAD 442.876.680

Bandung, 22 Januari 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERKEBUNAN,

GANDJAR YUDNIARSA, S.T., M.T., CRMP., QRMP.
Pembina Tingkat I

1AE684CDE4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1AE684CDE4

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno-Hatta Telp. (022) 7320048
Faksimil (022) 7320049 Website : dispusipda.jabarprov.go.id e-mail : dispusipda@jabarprov.go.id
BANDUNG 40286

Agenda Kerja / Kalender Kegiatan Tahun 2025

Perangkat Daerah (PD) : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nama PPID PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Nama Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Sasaran / Peserta	Perkiraan Jumlah Peserta
1	Forum Perangkat Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	11-12 Februari 2025	Dinas Kab/Kota Pengampu Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	60 orang
2	Pemilihan Duta Baca Jawa Barat 2025	April 2025	Siswa / Mahasiswa Jawa Barat	60 orang
3	Workshop Bunda Literasi	Mei 2025	Masyarakat Umum	500 orang
4	Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional	Mei 2025	Lembaga Kearsipan Daerah	60 orang
5	Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) dan SIDEBAR Award	November 2025	Lembaga Kearsipan Daerah	60 orang
6	Memory Kolektif Bangsa (MKB) Gedung Sate	2025	Masyarakat Umum	500 orang
7	Memory Kolektif Bangsa (MKB) Bendungan Jatigede	2025	Masyarakat Umum	500 orang
8	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (PBIS)	2025	Masyarakat Umum	500 orang
9	Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan	September 2025	Masyarakat Umum	100 orang
10	Peringatan Nasional Hari Perpustakaan	17 Mei 2025	Masyarakat Umum	100 orang
11	Peringatan Nasional Hari Kearsipan	18 Mei 2025	Masyarakat Umum	500 orang

a.n. KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,
Sekretaris,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ANDRI HERIYANTO, S.T., M.A.P
Pembina Tk. I

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Besaran Anggaran	Sumber Anggaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bidang Pemberdayaan Sosial	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp65.092.500	APBD
2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Bidang Pemberdayaan Sosial & UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp4.621.358.500	APBD
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
3	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Bidang Rehabilitasi Sosial	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp73.251.500	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Bidang Penanganan Fakir Miskin	96 persen	Januari-Desember 2025	Rp1.090.000.000	APBD
5	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Bidang Rehabilitasi Sosial	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp149.811.000	APBD
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp7.288.431.337	APBD

B9077A8BE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B9077A8BE3

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp2.094.292.198	APBD
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp2.671.762.532	APBD
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp9.625.846.028	APBD
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp4.162.173.501	APBD
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp4.193.755.529	APBD
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp6.920.124.012	APBD
13	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri	100 persen	Januari-Desember 2025	Rp689.305.405	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
14	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia	1 TMP	Januari-Desember 2025	Rp222.145.771	APBD

Cimahi, 07 Februari 2025
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT,

ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si. CRBD
Pembina Utama Muda

B9077A8BE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B9077A8BE3

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target Tahunan	Satuan	Input ke JAPATI
Bidang Perencanaan Teknik																								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Teknik Sumber Daya Air	Persentase Dokumen Perencanaan Teknik Sumber Daya Air Yang Berkualitas Sesuai Standar	Kepala Bidang Perencanaan Teknik	100%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Perencanaan teknik SUNDAWAPAN sesuai kriteria teknis yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis SUNDAWAPAN yang sesuai kriteria teknis yang berlaku		100%	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan	Terlayaninya Permohonan Bantuan Teknik perencanaan SUNDAWAPAN	Jumlah Dokumen Permohonan Bantuan Teknik Perencanaan Sundawapan yang terlayani	Angga Trysa	6	Dokumen	TRUE
																			Tersusunnya	Jumlah Dokumen	Angga Trysa	12	Dokumen	TRUE
																		Penyusunan	Tersusunnya	Jumlah Dokumen	Angga Trysa	12	Dokumen	FALSE
																		Penyusunan	Tersusunnya	Jumlah Dokumen	Angga Trysa	12	Dokumen	FALSE
																		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya laporan identifikasi potensi sumber daya air	Jumlah laporan identifikasi potensi Sumber Daya Air	Hana Listi/Pera Meliyanti	6	Laporan	TRUE
																			Tersusunnya data	Jumlah dokumen	Hana Listi/Pera	12	Dokumen	TRUE
																			Terkelolanya Sistem	Jumlah laporan	Hana Listi/Pera	12	Laporan	TRUE
																			Terbangunnya SIH3	Jumlah laporan	Hana Listi/Pera	4	Laporan	TRUE
					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI))	Kepala Dinas	56,89		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Teknik Irigasi	Persentase Dokumen Perencanaan Teknik Irigasi yang Berkualitas Sesuai Standar	Kepala Bidang Perencanaan Teknik		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Perencanaan teknik irigasi sesuai kriteria teknis yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Irigasi yang sesuai kriteria teknis yang berlaku		100%	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terlayaninya Permohonan Bantuan Teknik perencanaan Irigasi	Jumlah Dokumen Permohonan Bantuan Teknik Perencanaan irigasi yang terlayani	Heni Kusumawati	12	Dokumen	TRUE
																			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis untuk Konstruksi Irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis untuk Konstruksi Irigasi yang disusun	Heni Kusumawati	12	Dokumen	TRUE
Bidang Bina Konstruksi																								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Kepala Bidang Bina Konstruksi	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembangunan infrastruktur SDA sesuai ketentuan	Persentase Infrastruktur SDA yang terbangun sesuai ketentuan		100%	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terpantaunya Penerapan Sistem Manajeman ISO 9001: 2015 di UPTD PSDA dan Dinas SDA	Jumlah unit kerja yang terpantau penerapan Sistem Manajeman ISO 9001:2015	Syaeful Hidayat Ahmad	7	Unit Kerja	TRUE
																			Tersusunnya SOP dan	Jumlah Dokumen	Syaeful Hidayat	5	dokumen SOP &	TRUE
																		Pelatihan Tenaga	Terbinanya Pegawai	Jumlah Pegawai	Syaeful Hidayat	100	Pegawai	TRUE
																		Pembinaan dan Peningkatan	Terpantaunya	Jumlah unit kerja	Syaeful Hidayat	9	Unit Kerja	TRUE
																			Terpantaunya UPTD	Jumlah UPTD yang	Ikbal Maulana	6	UPTD	TRUE
																			Terpantaunya UPTD	Jumlah UPTD yang	Ikbal Maulana	6	UPTD	TRUE
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Kepala Dinas	56,89		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	Persentase Infrastruktur Irigasi yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Kepala Bidang Bina Konstruksi	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Pembangunan infrastruktur Irigasi sesuai ketentuan	Persentase Infrastruktur Irigasi yang terbangun sesuai ketentuan		100%	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Terpantaunya Pekerjaan Konstruksi Irigasi oleh UPTD	Jumlah Pekerjaan Konstruksi Irigasi oleh UPTD yang dipantau	Dikdik Ahmad Sodikin	8	Pekerjaan	TRUE
																			Tersedianya Aplikasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Dikdik Ahmad Sodikin	1	Aplikasi	TRUE
																			Terbinanya UPTD	Jumlah UPTD yang	Dikdik Ahmad	6	UPTD	TRUE
Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan																								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Kepala Dinas	56,89	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pemanfaatan Infrastruktur Irigasi sesuai ketentuan teknis operasional	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Irigasi yang	Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	100%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Tersosialisasikan ketentuan teknis pengelolaan infrastruktur irigasi	Persentase ketentuan teknis pengelolaan infrastruktur irigasi	Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	100%	Operasi dan Pemeliharaan	Terpantaunya operasi	Jumlah UPTD yang	Enjang Kuswaya	6	UPTD	TRUE
																			Tersusun dan	Jumlah Dokumen	Enjang Kuswaya	4	Dokumen	TRUE
																			Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen	Enjang Kuswaya	1	Dokumen	TRUE
					Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pemanfaatan Infrastruktur SDA sesuai ketentuan teknis operasional	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur SDA yang berfungsi sesuai	Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	100%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasikan dan terpantaunya ketentuan teknis pengelolaan	Persentase ketentuan teknis pengelolaan infrastruktur Sumber	Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas	Terpantaunya operasi	Jumlah UPTD yang	Sukaryono	6	UPTD	TRUE
																			Terbinanya UPTD	Jumlah UPTD yang	Sukaryono	6	UPTD	TRUE
																			Terpantaunya	Jumlah Dokumen	Sukaryono	1	Dokumen	TRUE
														Sarana dan	Persentase alokasi	Kepala Bidang	100%	Rehabilitasi	Terdistribusinya bahan	Jumlah dokumen	Sukaryono	1	Dokumen	TRUE
Bidang Bina Manfaat																								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang	Persentase peningkatan kapasitas tampung	Kepala Dinas	0,267	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air oleh pengguna	Persentase penguna SDA yang mematuhi ketentuan SDA	Kepala Bidang Bina Manfaat		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Meningkatnya	Persentase	Kepala Bidang	100%	Pembinaan dan	Tersusunnya	Jumlah	Revananda	3	Rekomendasi	TRUE
														Meningkatnya	Persentase	Kepala Bidang	100%	Evaluasi dan	Terlayaninya	Jumlah dokumen	Heni Kusumawati	12	Dokumen	TRUE
														Meningkatnya	Persentase	Kepala Bidang	100%	Pembinaan dan	Terpantaunya	Jumlah dokumen	Dicky Setiawan	12	Dokumen	TRUE

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target Tahunan	Satuan	Input ke JAPATI

No	Sub Kegiatan Tahun 2025	Ceklis
Bidang Perencanaan Teknis		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan	v
1	Penyusunan Rencana Teknis dan	v
2	Penyusunan Rencana Teknis dan	v
3	Penyusunan Rencana Teknis dan	v
4	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air	v
	Pengembangan dan Pengelolaan	v
1	Penyusunan Rencana Teknis dan	v
Bidang Bina Konstruksi		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga	v
1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	v
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	v
3	Penyediaan SOP Penyelenggaraan	v
	Penyelenggaraan Sistem Informasi	v
1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa	v

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	
UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki																								
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	(Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air)	Kepala Dinas	0,267	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	0,07% (37.032,33 m3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan peralatan SDA beroperasi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase bangunan air yang beroperasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Teroperasikannya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Beroperasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Darmadi	9	Embung dan Penampung Air Lainnya	108
																		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya bahan data Hidrologi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Dokumen Hidrologi pada WS. Ciwulan - Cilaki yang disusun	Darmadi	12	Dokumen	
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan SDA pada WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase bangunan air yang terpelihara pada WS. Ciwulan-Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Ciwulan - Cilaki	Darmadi	9	Embung dan Penampung Air Lainnya	36
																		Normalisasi/Restorasi sungao	Ternormalisasinya sungai pada WS Ciwulan-Cilaki	Panjang sungai yang dinormalisasi pada WS. Ciwulan-Cilaki	Darmadi	12	km	0,5 km
																		Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Darmadi		Embung dan Penampung Air Lainnya	
																		Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk melindungi mata air pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Infrastruktur untuk melindungi mata air yang terbangun pada WS. Ciwulan - Cilaki	Darmadi		Infrastruktur untuk melindungi mata air	
														Meningkatnya kualitas pelayanan saran teknis pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Permohonan Saran Teknis yang dilayani sesuai standar pada WS. Ciwulan-Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlayaninya permohonan Saran Teknis pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Dokumen Saran Teknis yang dikeluarkan pada WS. Ciwulan - Cilaki	Darmadi	12	Dokumen	
								Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	65 poin	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta		Pakaian Dinas	
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki melalui rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat	Yusan Okta	12	Dokumen	
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	13	Barang Cetakan dan Penggandaan	
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	13	komponen	
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	% Realiasi APBD pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	16	Kegiatan	

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	16	Kendaraan	
																		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Mebel pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	10	mebel	
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik pada UPTD PSDA WS. WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	1	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS.Ciwulan - Cilaki	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	16	Kendaraan	
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	10	unit	
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui sewa pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil sewa pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jasa
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	5	Jasa	5 unit kerja
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Yusan Okta	1	Unit Kerja	
				(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI))	Kepala Dinas	56,89	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur Irigasi memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 6 Daerah Irigasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	61,03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Irigasi beroperasi pada UPTD PSDA WS. Ciwulan - Cilaki	Nilai Komponen Penunjang IKSI pada 6 Daerah Irigasi di WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	31,01	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Teroperasikannya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki yang dioperasikan	Henki Suseno	6	Daerah Irigasi	72
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan Irigasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Nilai Prasarana Fisik pada 6 Daerah Irigasi di WS. Ciwulan - Cilaki	Kepala UPTD Ciwulan - Cilaki	30,02	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki yang terpelihara	Henki Suseno	6	Daerah Irigasi	24
																		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Ciwulan - Cilaki yang direhabilitasi	Henki Suseno	6	Daerah Irigasi	DAK 1. Biuk 2. Padawaras

No	Sub Kegiatan Tahun 2025	Ceklis
	Pengelolaan SDA dan Bangunan	v

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan					
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan
1	Pembangunan Insfrastruktur untuk	v																					
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	v																					
	Normalisasi/Restorasi Sungai	v																					
3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air	v																					
4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan	v																					
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	v																					
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	v																					
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	v																					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat	v																					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	v																					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v																					
	Penyediaan Komponen Instalasi	v																					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v																					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v																					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	v																					
	Pengadaan Barang Milik Daerah	v																					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	v																					
	Pengadaan Mebel	v																					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v																					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	v																					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	v																					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	v																					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	v																					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	v																					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	v																					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	v																					

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	Input ke JAPATI
UPTD PSDA WS. Citarum																								
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	(Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air)	Kepala Dinas	0,267	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	0,07% (36.671,57 m3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan peralatan SDA beroperasi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase bangunan dan peralatan SDA yang beroperasi pada WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Teroperasikannya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citarum	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Beroperasi pada WS. Citarum	Agus Iwan	11	Embung dan Penampung Air Lainnya	FALSE
																		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya bahan data Hidrologi pada WS. Citarum	Jumlah Dokumen Hidrologi pada WS. Citarum yang disusun	Agus Iwan	12	Dokumen	FALSE
														Dukungan kegiatan terhadap distribusi transmisi air baku TPPAS Legok Nangka terlaksana sesuai yang dianggarkan	Persentase kegiatan pemenuhan transmisi air baku TPPAS Legok Nangka yang terlaksana sesuai yang dianggarkan	Kepala UPTD Citarum	100%	Pembangunan Unit Air Baku	Tersedianya lahan untuk distribusi transmisi air baku TPPAS Legok Nangka	Luas Area lahan yang dibebaskan untuk distribusi transmisi air baku TPPAS Legok Nangka	Agus Iwan	3,9	Ha	FALSE
																			Terbangunnya bak sedimen untuk distribusi transmisi air baku TPPAS Legok Nangka	Jumlah bak penampung yang dibangun untuk distribusi transmisi air baku TPPAS Legok Nangka	Agus Iwan	1	Bak Penampung	FALSE
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan SDA pada WS. Citarum	Persentase bangunan air yang terpelihara pada WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citarum	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Citarum	Agus Iwan	13	Embung dan Penampung Air Lainnya	FALSE
																		Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citarum	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi pada WS. Citarum	Agus Iwan		Embung dan Penampung Air Lainnya	FALSE
																		Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk melindungi mata air pada WS. Citarum	Jumlah Infrastruktur untuk melindungi mata air yang terbangun pada WS. Citarum	Agus Iwan		0	FALSE
														Meningkatnya kualitas pelayanan saran teknis pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Permohonan Saran Teknis yang dilayani sesuai standar pada WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlayaninya permohonan Saran Teknis pada WS. Citarum	Jumlah Dokumen Saran Teknis yang dikeluarkan pada WS. Citarum	Agus Iwan	12	Dokumen	FALSE
															Persentase Laporan Nilai Perolehan Air Permukaan yang sesuai peraturan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%		Tersusunnya Lapora Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) yang disusun	Agus Iwan	1	Dokumen	FALSE
														Meningkatnya Mitigasi Banjir pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Banjir yang tertangani UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	25%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Laporan Pengendalian Banjir	Jumlah Dokumen Pengendalian Banjir yang disusun	Agus Iwan	1	Dokumen	FALSE
								Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS. Citarum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	65	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada UPTD PSDA WS. Citarum melalui rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	12	Dokumen	TRUE
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	12	Barang Cetakan dan Penggandaan	TRUE
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TRUE
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	14	komponen	TRUE

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	Input ke JAPATI
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadan	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	42	Peralatan Rumah Tangga	TRUE
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada UPTD PSDA WS. Citarum	% Realisasi APBD pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	5	Kegiatan	TRUE
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik pada UPTD PSDA WS. WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	4	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TRUE
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS.Citarum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	30	Kendaraan	TRUE
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	37	unit	TRUE
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui sewa pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil sewa pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	12	Jasa	TRUE
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	1	Unit Kerja	TRUE
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Citarum	Agus Iwan Priatman, ST., M.Si	1	Unit Kerja	TRUE
				(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI))	Kepala Dinas	56,89	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur Irigasi memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 34 Daerah Irigasi pada WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	54,57	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Irigasi beroperasi pada UPTD PSDA WS. Citarum	Nilai Komponen Penunjang IKSI pada 34 Daerah Irigasi di WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	32,89	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Teroperasikannya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum yang dioperasikan	Wandi Yuswandi	34	Daerah Irigasi	TRUE
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan Irigasi pada WS. Citarum	Nilai Prasarana Fisik pada 34 Daerah Irigasi di WS. Citarum	Kepala UPTD Citarum	21,68	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum yang terpelihara	Wandi Yuswandi	34	Daerah Irigasi	TRUE
																		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citarum yang direhabilitasi	Wandi Yuswandi	1	Daerah Irigasi	TRUE

No	Sub Kegiatan Tahun 2025	Ceklis
	Pengelolaan SDA dan Bangunan	**v**
1	Pembangunan Insfrastruktur untuk	v

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	Input ke JAPATI
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	v																						
3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air	v																						
4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan	v																						
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	v																						
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	v																						
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	v																						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	v																						
1	Penyediaan Komponen Instalasi	v																						
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v																						
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v																						
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v																						
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	v																						
	Pengadaan Barang Milik Daerah	v																						
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v																						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	v																						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	v																						
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	v																						
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	v																						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	v																						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	v																						
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	v																						

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	
UPTD PSDA WS. Citanduy																								
	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	(Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air)	Kepala Dinas	0,267	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	0,06% (33.384,80 m3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan peralatan SDA beroperasi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase bangunan dan perlatan SDA yang beroperasi pada WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Teroperasikannya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citanduy	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Beroperasi pada WS. Citanduy	Dudi Setianugraha	5	Embung dan Penampung Air Lainnya	TRUE
																		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya bahan data Hidrologi pada WS. Citanduy	Jumlah Dokumen Hidrologi pada WS. Citanduy yang disusun	Dudi Setianugraha	12	Dokumen Hidrologi	TRUE
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan SDA pada WS. Citanduy	Persentase bangunan air yang terpelihara pada WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citanduy	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Citanduy	Dudi Setianugraha	5	Embung dan Penampung Air Lainnya	TRUE
																		Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Citanduy	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi pada WS. Citanduy	Dudi Setianugraha	4	Situ	TRUE
														Meningkatnya kualitas pelayanan saran teknis pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase Permohonan Saran Teknis yang dilayani sesuai standar pada WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlayaninya permohonan Saran Teknis pada WS. Citanduy	Jumlah Dokumen Saran Teknis yang dikeluarkan pada WS. Citanduy	Dudi Setianugraha	12	Dokumen Saran Teknis	TRUE
								Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	65,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada UPTD PSDA WS. Citanduy melalui rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat	Irwan Noor	12	Dokumen	TRUE
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	12	Laporan	TRUE
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TRUE
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD PSDA	Irwan Noor	10	komponen	TRUE
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	3	Peralatan Rumah Tangga	TRUE
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada UPTD PSDA WS. Citanduy	% Realiasi APBD pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100 %	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	15	Laporan Keuangan Sub. Kegiatan	TRUE
Meningkatnya Kualitas infrastruktur													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik pada UPTD PSDA WS. WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	3	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TRUE

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan	
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS.Citanduy	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	17	Kendaraan	
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	27	unit	TRUE
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui sewa pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil sewa pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	5	peralatan dan perlengkapan kantor	TRUE
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	6	jasa	TRUE
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Irwan Noor	3	unit	TRUE
					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI))	Kepala Dinas	56,89	Pengelolaan Sumber Daya Air	Infrastruktur Irigasi memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	54,1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Irigasi beroperasi pada UPTD PSDA WS. Citanduy	Nilai Komponen Penunjang IKSI pada 10 Daerah Irigasi di WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	25,6 poin	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Teroperasikannya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy yang dioperasikan	Cecep Sopiyan	10	Daerah Irigasi	TRUE
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan Irigasi pada WS. Citanduy	Nilai Prasarana Fisik pada 10 Daerah Irigasi di WS. Citanduy	Kepala UPTD Citanduy	28,5 poin	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy yang terpelihara	Cecep Sopiyan	10	Daerah Irigasi	TRUE
																		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Citanduy yang direhabilitasi	Cecep Sopiyan	2	Daerah Irigasi	TRUE

No	Sub Kegiatan Tahun 2025	Ceklis
	Pengelolaan SDA dan Bangunan	**v**
1	Pembangunan Insfrastruktur untuk	v
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	v
3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air	v
4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan	v
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	**v**
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	v
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	v
	Administrasi Kepegawaian Perangkat	**v**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	v
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**v**
1	Penyediaan Komponen Instalasi	v
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v

CASCADING BIDANG TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan					
Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub	Sasaran	Indikator	Pengampu/	Target	Satuan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	v																					
	Pengadaan Barang Milik Daerah	v																					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v																					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	v																					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	v																					
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	v																					
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	v																					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	v																					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	v																					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	v																					

CASCADING UPTD CISADEA - CIBARENO TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan				
Sasaran Strategis RPJMD	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran Strategis PD	Indikator Program	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu/ Koordinator/ Ketua Tim	Target
IRIGASI																						
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Kepala Dinas Sumber Daya Air	56,89	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur Irigasi memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 12 Daerah Irigasi pada WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	56,29	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Irigasi beroperasi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Nilai Komponen Penunjang IKSI pada 12 Daerah Irigasi di WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	35,89 Point	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Teroperasikannya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno yang dioperasikan	Asep Nugraha	12 DI
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan Irigasi pada WS. Cisadea - Cibareno	Nilai Prasarana Fisik pada 12 Daerah Irigasi di WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	20,40 Point		Terpeliharanya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno yang terpelihara		12 DI
																		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cisadea - Cibareno yang direhabilitasi		1 DI
SUNDAWAPAN																						
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibaren	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	0,09% (43.196,20 M3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan SDA pada WS. Cisadea-Cibareno	Persentase bangunan air yang terpelihara pada WS. Cisadea-Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	28,57%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Cisadea - Cibareno	Neng Ana Purnamasari	6 Situ
																		Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya sungai pada WS. Cisadea - Cibareno	Panjang Infrastruktur perkuatan tebing sungai yang dibangun pada WS. Cisadea - Cibareno		0,2 Km
														Bangunan dan peralatan SDA beroperasi pada UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Persentase bangunan air yang beroperasi pada WS. Cisadea-Cibareno		100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya bahan data Hidrologi pada WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Hidrologi pada WS. Cisadea-Cibareno yang disusun		12 Dokumen
																		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Teroperasikannya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Beroperasi pada WS. Cisadea-Cibareno		14 Embung dan Penampung Air Lainnya
														Meningkatnya kualitas pelayanan saran teknis pada UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Persentase Permohonan Saran Teknis yang dilayani sesuai standar pada WS. Cisadea-Cibareno		100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlayaninya permohonan Saran Teknis pada WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Dokumen Saran Teknis yang dikeluarkan pada WS. Cisadea-Cibareno		12 Dokumen
TATA USAHA																						
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	65 point	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala Subbagian tata Usaha UPTD PSDA WS Cisadea - Cibareno	8 Barang Cetakan dan Penggandaan
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		22 Komponen
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		57 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno melalui rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat		12 Dokumen
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	% Realiasi APBD pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		1 Kegiatan
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		1 Unit Kerja
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui sewa pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil sewa pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		4 Jasa

CASCADING UPTD CISADEA - CIBARENO TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan				
Sasaran Strategis RPJMD	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran Strategis PD	Indikator Program	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu/ Koordinator/ Ketua Tim	Target
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		1 Unit Kerja
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		6 Unit
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		5 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Cisadea - Cibareno		27 Kendaraan

CASCADING UPTD Cimanuk - Cisanggarung TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran Strategis RPJMD	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran Strategis PD	Indikator Program	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu/ Koordinator/ Ketua Tim	Target	Satuan	
IRIGASI																								
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Kepala Dinas Sumber Daya Air	56,89	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur Irigasi memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 27 Daerah Irigasi pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	57,03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Bangunan Irigasi beroperasi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Nilai Komponen Penunjang IKSI pada 27 Daerah Irigasi di WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	35,03 Point	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Teroperasikannya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cimanuk - Cisanggarung yang dioperasikan	Suhanan	27	DI	FALSE
														Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan Irigasi pada WS.	Nilai Prasarana Fisik pada 27 Daerah Irigasi di WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk -	22,00 Point		Terpeliharanya Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan pada WS. Cimanuk - Cisanggarung yang terpelihara		27	DI	TRUE
SUNDAWAPAN																								
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	0,002% (1000 m3)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas pemeliharaan bangunan SDA pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase bangunan air yang terpelihara pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	65%	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Donny Siswanto	11	Embung dan Penampung Air Lainnya	TRUE
														Bangunan dan peralatan SDA beroperasi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase bangunan dan peralatan SDA yang beroperasi pada WS. Cimanuk - Cisanggarung		100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Laporan Kualitas Air pada WS. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah Laporan Kualitas Air pada WS. Cimanuk-Cisanggarung	Dwi Endiriyanti	3	Laporan	TRUE
																			Tersusunnya bahan data Hidrologi pada WS. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah Dokumen Hidrologi pada WS.Cimanuk-Cisanggarung yang disusun	Donny Siswanto	12	Dokumen	TRUE
																		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Teroperasikannya Embung dan Penampung Air Lainnya pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Beroperasi pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Donny Siswanto	11	Embung dan Penampung Air Lainnya	TRUE
														Meningkatnya kualitas pelayanan saran teknis pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase Permohonan Saran Teknis yang dilayani sesuai standar pada WS. Cimanuk - Cisanggarung		100%	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlayaninya permohonan Saran Teknis pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Dokumen Saran Teknis yang dikeluarkan pada WS. Cimanuk - Cisanggarung	Donny Siswanto	10	Dokumen	TRUE
TATA USAHA																								
Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Gubernur	76,57	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Persentase peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Kepala Dinas	0,267	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Pada UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	65	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala Subbagian tata Usaha UPTD PSDA WS Cimanuk - Cisanggarung	12	Barang Cetakan dan Penggandaan	TRUE
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		30	Komponen	TRUE
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		4.266	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TRUE
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung melalui rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat		12	Dokumen	TRUE
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung		2.561	Peralatan Rumah Tangga	TRUE
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	% Realiasi APBD pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan pada UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung		15	Kegiatan	TRUE
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		5	Uni Kerja	TRUE
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui sewa pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil sewa pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		113	Jasa	TRUE
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		5	Unit Kerja	TRUE
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		39	Unit	TRUE

CASCADING UPTD Cimanuk - Cisanggarung TAHUN 2025

Kinerja Provinsi Jawa Barat				Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Program					Kinerja Kegiatan					Kinerja Sub Kegiatan						
Sasaran Strategis RPJMD	Indikator	Pengampu	Target	Sasaran Strategis PD	Indikator Program	Pengampu	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Pengampu	Target	Nama Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu	Target	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Pengampu/ Koordinator/ Ketua Tim	Target	Satuan	
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	80%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		5	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TRUE
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya pada UPTD PSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung		36	Kendaraan	TRUE

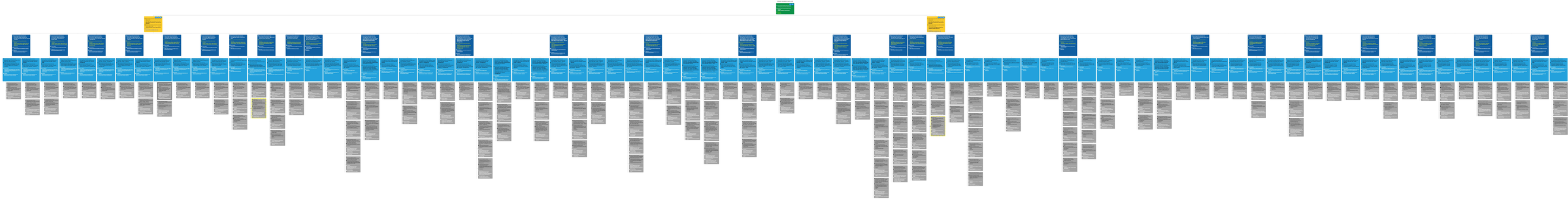

Balai Latihan Kerja Mandiri					
No	**Nama Program/Kegiatan**	**Penanggung Jawab/Pelaksana**	**Target**	**Jadwal Pelaksanaan**	**Sumber dan Besar Anggaran**
I	**PROGRAM PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) 2025**				
1	Program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kejuruan Tata Boga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Solokan Jeruk	BLK Mandiri & Tim Pokja PPKS Pemprov Jabar	26 Orang	Januari	Donasi gotong royong dari berbagai unsur elemen Pemerintahan, Akademisi, Swasta & Masyarakat
2	Program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kejuruan Tata Boga bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Rancaekek	BLK Mandiri & Tim Pokja PPKS Pemprov Jabar	30 Orang	Januari	Donasi gotong royong dari berbagai unsur elemen Pemerintahan, Akademisi, Swasta & Masyarakat
II	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				
1	Pelatihan Kerja Mandiri Mobile Training Unit (MTU) - Kejuruan Tata Boga - Akt. I	BLK Mandiri	20 Orang	Februari	APBD = Rp. 174.277.818 #POKIR/ASPIRASI
2	Pelatihan Kerja Mandiri Mobile Training Unit (MTU) - Kejuruan Barista - Akt. II	BLK Mandiri	20 Orang	Februari	APBD = Rp. 172.477.818 #POKIR/ASPIRASI

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

3	Pelatihan Kerja Mandiri Mobile Training Unit (MTU) - Kejuruan Las Listrik Dasar - Akt. III	BLK Mandiri	20 Orang	Februari	APBD = Rp. 185.277.818 #POKIR/ASPIRASI
4	Pelatihan Kerja Mandiri Mobile Training Unit (MTU) - Kejuruan Tata RIas Wajah - Akt. IV	BLK Mandiri	20 Orang	April	APBD = Rp. 176.377.818 #POKIR/ASPIRASI
5	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Las Listrik Dasar - Akt. V	BLK Mandiri	20 Orang	April	APBD = Rp. 145.590.818 #POKIR/ASPIRASI
6	Pelatihan Kerja Mandiri Mobile Training Unit (MTU) - Kejuruan Tata Rias Wajah - Akt. VI	BLK Mandiri	20 Orang	Mei	APBD = Rp. 176.377.818 #POKIR/ASPIRASI
7	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Boga - Akt I	BLK Mandiri	20 Orang	Juni	APBD = Rp. 143.207.249 #DBHCHT
8	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Barista - Akt II	BLK Mandiri	20 Orang	Juni	APBD = Rp. 141.407.249 #DBHCHT
9	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Rias Wajah - Akt III	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 145.307.249 #DBHCHT

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

10	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Teknik Cukur Dasar - Akt IV	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 137.307.249 #DBHCHT
11	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Barista - Akt V	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 141.407.249 #DBHCHT
12	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Las LIstrik Dasar - Akt VI	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 154.207.249 #DBHCHT
13	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Boga - Akt VII	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 143.207.249 #DBHCHT
14	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Hidroponik - Akt VIII	BLK Mandiri	20 Orang	Juli	APBD = Rp. 144.907.249 #DBHCHT
15	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Teknik Cukur Dasar - Akt IX	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 137.307.249 #DBHCHT
16	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Kecantikan Rambut - Akt X	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 145.107.249 #DBHCHT

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

17	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Rias Wajah- Akt XI	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 145.307.249 #DBHCHT
18	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Kecantikan Rambut - Akt XII	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 145.107.249 #DBHCHT
19	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Tata Boga - Akt XIII	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 143.207.249 #DBHCHT
20	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training (IHT) - Kejuruan Barista - Akt XIV	BLK Mandiri	20 Orang	Agustus	APBD = Rp. 141.407.249 #DBHCHT
21	Pelatihan Kerja Mandiri In House Training Kejuruan Digital Marketing	BLK Mandiri	20 Orang	September	APBD = Rp. 69.620.092 #POKIR/ASPIRASI

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

BLK KOMPETENSI					
No.	**Nama Program / Kegiatan**	**Penanggung Jawab / Pelaksana**	**Target**	**Jadwal Pelaksanaan**	**Sumber dan Besar Anggaran**
I	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**				
1	Program Pelatihan Plate Welder GMAW 3G/PF	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Februari 2025	APBD :
	(Angkatan 1)				Rp. 218.093.075
2	Program Pelatihan Teknik AC Residential	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Februari 2025	APBD :
	(Angkatan 1)				Rp. 189.673.587
3	Program Pelatihan Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Februari 2025	APBD :
	(Angkatan 1)				Rp. 205.847.827
4	Program Pelatihan Service Pemeliharaan Kendaraan Ringan Roda Empat Sistem Injeksi	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Februari 2025	APBD :
	(Angkatan 1)				Rp. 196.420.979
5	Program Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Februari 2025	APBD :
	(Angkatan 1)				Rp. 207.358.515
6	Program Pelatihan Operator Listrik Industri	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	APBD :
	(Angkatan 2)				Rp. 175.241.955
7	Program Pelatihan Desain Grafis Muda	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	APBD :

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

	(Angkatan 2)				Rp. 163.234.451
8	Program Pelatihan Plate Welder SMAW 3G/PF	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	DBHCHT
	(Angkatan 1)				Rp. 218.098.339
9	Program Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	DBHCHT :
	(Angkatan 1)				Rp. 207.358.515
10	Program Pelatihan Service Sepeda Motor Konversi Listrik	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	DBHCHT :
	(Angkatan 1)				Rp. 211.397.667
11	Program Pelatihan Digital Marketing	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Apr-25	DBHCHT :
	(Angkatan 1)				Rp. 163.489.491
12	Program Pelatihan Teknik AC Residential	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT :
	(Angkatan 2)				Rp. 189.673.587
13	Program Pelatihan Operator Pengoperasian Otomasi Elektronika Industri	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT :
	(Angkatan 2)				Rp. 200.080.755
14	Program Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT :
	(Angkatan 2)				Rp. 207.358.515
15	Program Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT :
	(Angkatan 2)				Rp. 193.417.459
16	Program Pelatihan Desain Grafis Muda	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT :
	(Angkatan 2)				Rp. 163.234.451

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

17	Program Pelatihan Plate Welder SMAW 3G/PF (Angkatan 2)	UPTD BLK KOMPETENSI	16 Orang	Juni 2025	DBHCHT : Rp. 218.098.339

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

LTSA PMI					
No	**Nama Program/Kegiatan**	**Penanggung Jawab/Pelaksana**	**Target**	**Jadwal Pelaksanaan**	**Sumber dan Besar Anggaran**
I	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA/ Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**				
1	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan I)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Februari 2025	APBD : Rp. 87.998.366
2	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan II)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Februari 2025	APBD : Rp. 87.998.366
3	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan III)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Apr-25	APBD : Rp. 87.998.366
4	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan IV)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Mei 2025	APBD : Rp. 87.998.366

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

5	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan V)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Mei 2025	APBD : Rp. 87.998.366
6	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan VI)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Agustus 2025	APBD : Rp. 87.998.366
7	PELATIHAN CPMI_SIJALU (Siap Kerja Ke Luar Negeri) (Angkatan VII)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Agustus 2025	APBD : Rp. 87.998.366
8	PELATIHAN CPMI_DBHCHT (Angkatan I Kejuruan Bahasa Inggris)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Juni 2025	DBHCHT : Rp. 275.250.180
9	PELATIHAN CPMI_DBHCHT (Angkatan II Kejuruan Bahasa Inggris)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Juni 2025	DBHCHT : Rp. 275.250.180
10	PELATIHAN CPMI_DBHCHT (Angkatan III Kejuruan Bahasa Inggris)	UPTD LTSA PMI	16 orang	Juni 2025	DBHCHT : Rp. 275.250.180

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

11	PEMBERDAYAAN PMI PURNA PENEMPATAN (Angkatan I)	UPTD LTSA PMI	30 orang	September 2025	APBD : Rp. 186.335.500
12	PEMBERDAYAAN PMI PURNA PENEMPATAN (Angkatan II)	UPTD LTSA PMI	30 orang	September 2025	APBD : Rp. 186.335.500
13	PEMAGANGAN JEPANG	UPTD LTSA PMI	150 orang	Juli s.d. September 2025	APBD : Rp. 787.500.000
14	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan I)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Januari 2025	APBD : Rp. 37.213.967
15	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan II)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Februari 2025	APBD : Rp. 37.213.967
16	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan III)	UPTD LTSA PMI	40 orang	April 2025	APBD : Rp. 37.213.967
17	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan IV)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Mei 2025	APBD : Rp. 37.213.967

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

18	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan V)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Mei 2025	APBD : Rp. 37.213.967
19	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan VI)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Agustus 2025	APBD : Rp. 37.213.967
20	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan VII)	UPTD LTSA PMI	40 orang	September 2025	APBD : Rp. 37.213.967
21	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan VIII)	UPTD LTSA PMI	40 orang	September 2025	APBD : Rp. 37.213.967
22	SOSIALISASI AMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Angkatan IX)	UPTD LTSA PMI	40 orang	Oktober 2025	APBD : Rp. 37.213.967

Bandung, 24 Januari 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, S.H.
Pembina Utama Muda

315F777FA0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/315F777FA0

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TETEN ALI MULKU ENGKUN, Ph.D.

No.	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Kepala Biro Organisasi	100%	11 Bulan	Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp. 148.280.000,00

Bandung, 17 Januari 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI,
u.b.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO ORGANISASI,

TETEN ALI MULKU ENGKUN, Ph.D.
Pembina Utama Muda

66994A38FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/66994A38FB

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

No	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50 persen	12 Bulan	Pendapatan Asli Daerah Rp.2.500.000.000

DAFTAR AGENDA PROGRAM/KEGIATAN
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

No	Nama Program/ Kegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran
1	**Halal Life Trensetter**	Manajelem Pelaksana Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)	Masyarakat	21-23 Februari 2025	**Sponshopship / 1.1 M**
2	**Inaugurasi Regenerasi Petani**	Tim Regenerasi Petani Provinsi Jawa Barat	Petani di Jawa Barat	April 2025	**APBD**

Bandung, 23 Januari 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Yuke Mauliani Septina,S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda

7145749DE7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7145749DE7

7. PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025 YANG MEMUAT NAMA PROGRAM/ KEGIATAN, PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA, TARGET, JADWAL PELAKSANAAN, DAN SUMBER ANGGARAN SERTA BESARAN ANGGARAN.

BIRO UMUM				
NO.	KODE SUB	SUBKEGIATAN	31 Desember 2024	
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	241.584.550,00	716.368.435
2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.639.000,00	
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	414.677.635,00	
4	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	30.000.000,00	
5	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.467.250,00	
6	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan dan Tunjangan ASN	193.276.427.153,00	194.129.659.432
7	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	468.751.002,00	
8	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	70.215.865,00	
9	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.300.000,00	
10	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	287.965.412,00	
11	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	752.544.000,00	752.544.000
12	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	346.894.500,00	1.525.139.500
13	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1.178.245.000,00	
14	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	585.463.237,00	19.395.647.607
15	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.826.332.429,46	
16	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.834.661.200,00	
17	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1.200.500.000,00	
18	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.153.142.741,00	
19	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	795.548.000,00	
20	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.725.600.000,00	28.326.250.811
21	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	946.101.600,00	
22	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.568.928.500,00	
23	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.085.620.710,54	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E7CE6A8D6B
E7CE6A8D6B

24	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.279.191.728,00	84.567.034.200
25	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.287.842.472,00	
26	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.604.759.978,00	33.181.397.114
27	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.409.394.000,00	
28	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.167.243.136,00	
29	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakada	2.215.627.310,00	31.015.627.310
30	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	28.800.000.000,00	
31	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	9.035.698.578,00	9.035.698.578
JUMLAH			**402.645.366.987,00**	

Batasan Pagu	**402.645.366.987,00**
Pagu Validasi	**402.645.366.987,00**
Rincian Pagu	**402.645.366.987,00**
Selisih	**-**

Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO UMUM,

TULUS ARIFAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda

E7CE6A8D6B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E7CE6A8D6B